



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

(AUDITED)



Kontak kami:

BAWASLU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. DI. Panjaitan No.49 Kel. Mantrijeron Kec. Mantrijeron
Kota Yogyakarta, 55143

Phone/Fax : 0274-4436897

e-mail : set.diy@bawaslu.go.id

website : <https://yogyakarta.bawaslu.go.id/>

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Yogyakarta, 21 April 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,

Drs. Sorening Yosmar Dano, M.Si.
NIP. 197005131989031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	v
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	35
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	52
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	65
F. Pengungkapan Penting Lainnya	69
VI. Lampiran	

DAFTAR TABEL

		halaman
Tabel 1	Rincian Anggaran Semula-Menjadi Revisi Ke Tiga TA 2021	21
Tabel 2	Rincian Anggaran Semula-Menjadi Revisi Ke Empat TA 2021	21
Tabel 3	Rincian Anggaran Semula-Menjadi Revisi Ke Enam TA 2021	22
Tabel 4	Rincian Anggaran Semula-Menjadi Revisi Ke Delapan TA 2021	22
Tabel 5	Pagu Anggaran Belanja Per 31 Desember 2021	23
Tabel 6	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2021	24
Tabel 7	Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2021 dan 2020	24
Tabel 8	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021	25
Tabel 9	Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021 dan 2020	25
Tabel 10	Pengembalian Belanja Per 31 Desember 2021	26
Tabel 11	Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 2020	26
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 2020	28
Tabel 13	Realisasi Belanja Penanganan Pandemi COVID-19 per 31 Desember 2021	28
Tabel 14	Perbandingan Belanja Barang (RM) per 31 Desember 2021 dan 2020	29
Tabel 15	Rincian Pengembalian Belanja Barang (RM) TA 2021	30
Tabel 16	Realisasi Belanja Penanganan Pandemi COVID-19 dari Sumber RM per 31 Desember 2021	30
Tabel 17	Realisasi Belanja Barang (HDN) per 31 Desember 2021	31
Tabel 18	Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 2020	32
Tabel 19	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020	32
Tabel 20	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021	32
Tabel 21	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020	33
Tabel 22	Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2021	33
Tabel 23	Rincian Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi per 31 Desember 2021	33
Tabel 24	Rincian Software Komputer per 31 Desember 2021	34
Tabel 25	Rincian Pengembangan Nilai Aset per 31 Desember 2021	34
Tabel 26	Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	35
Tabel 27	Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	35
Tabel 28	Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	35
Tabel 29	Mutasi Persediaan per 31 Desember 2021	36
Tabel 30	Mutasi Tambah Pembelian Persediaan TA 2021	36
Tabel 31	Mutasi Kurang Barang Persediaan TA 2021	37
Tabel 32	Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021	38
Tabel 33	Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021	39
Tabel 34	Daftar Barang Yang Dihentikan Penggunaannya Karena Rusak Berat TA 2021	39
Tabel 35	Penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2021	40
Tabel 36	Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021	41
Tabel 37	Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021	41
Tabel 38	Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021	42
Tabel 39	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	42
Tabel 40	Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021	43
Tabel 41	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021	44
Tabel 42	Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021	44
Tabel 43	Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021	45
Tabel 44	Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021	46
Tabel 45	Rincian Penghentian BMN Karena Rusak Berat sesuai Surat Keterangan Nomor: 161/PL.08/YO/09/2021	46
Tabel 46	Rincian Penghentian BMN karena Rusak Berat sesuai Surat Keterangan Nomor: 174/PL.08/YO/10/2021	47
Tabel 47	Rincian Penghapusan BMN TA 2021	47
Tabel 48	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	48
Tabel 49	Saldo Amortisasi Software Per 31 Desember 2021	48
Tabel 50	Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Per 31 Desember 2021	49

Tabel	51	Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	49
Tabel	52	Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021	50
Tabel	53	Mutasi Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2021	52
Tabel	54	Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2021 dan 2020	53
Tabel	55	Mutasi Beban Pegawai per 31 Desember 2021	54
Tabel	56	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2021	54
Tabel	57	Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020	54
Tabel	58	Mutasi Beban Persediaan TA 2021	55
Tabel	59	Realisasi Belanja Barang Persediaan TA 2021	55
Tabel	60	Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan 2020	56
Tabel	61	Mutasi Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021	57
Tabel	62	Belanja Barang yang Masih Harus dibayar per 31 Desember 2021	58
Tabel	63	Pembayaran Belanja barang dan jasa TAYL	58
Tabel	64	Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 2020	59
Tabel	65	Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 2020	60
Tabel	66	Mutasi Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 2020	60
Tabel	67	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 dan 2020	61
Tabel	68	Perhitungan beban penyusutan amortisasi dengan akumulasi penyusutan	61
Tabel	69	Selisih beban penyusutan amortisasi dengan akumulasi penyusutan	61
Tabel	70	Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2021 dan 2020	63
Tabel	71	Rincian Pengesahan Pengembalian Sisa Hibah per 31 Desember 2021	65
Tabel	72	Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2021 dan 2020	66
Tabel	73	Diterima dari Entitas Lain (DDEL) per 31 Desember 2021	66
Tabel	74	Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) per 31 Desember 2021	66
Tabel	75	Rincian Pengesahan Hibah per 31 Desember 2021	67
Tabel	76	Rincian Pengesahan SP4HL dan SP3HL per 31 Desember 2021	67
Tabel	77	Rincian Saldo Hibah per 31 Desember 2021	67
Tabel	78	Penurunan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	68

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yogyakarta, 21 April 2022

KWASA Pengguna Anggaran,



Drs. Screning Yosmar Dano, M.Si.
NIP. 19700513 198903 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6.000.001.

Realisasi Belanja pada TA 2021 sebesar Rp15.864.785.050 atau mencapai 98,35 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp16.131.271.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.197.102.056 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp5.754.180; Aset Tetap (neto) sebesar Rp2.079.215.254; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp112.132.622. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp31.270.696 dan Rp2.165.831.360.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 atau Nihil, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp16.665.074.700 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp16.665.074.700. Defisit Kegiatan Non Operasional adalah sebesar Rp626.179.718. Pos Luar Biasa adalah Nihil atau sebesar Rp0, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp17.291.254.418.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp5.843.391.584 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp17.291.254.418 dan koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp1.143.065.397 ditambah Transaksi Antar Entitas adalah sebesar Rp14.756.759.591. Penurunan Ekuitas adalah sebesar Rp3.677.560.224 sehingga Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah senilai Rp2.165.831.360.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK

adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021		% thd Angg	31 DESEMBER 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	6.000.001	-	2.974.555
JUMLAH PENDAPATAN		-	6.000.001	-	2.974.555
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasional					
Belanja Pegawai	B.3	6.272.351.000	6.145.034.156	97,97%	5.499.802.573
Belanja Barang	B.4	9.428.347.000	9.291.658.221	98,55%	29.044.898.091
Belanja Modal	B.5	430.573.000	428.092.673	99,42%	461.802.905
JUMLAH BELANJA OPERASIONAL		16.131.271.000	15.864.785.050	98,35%	35.006.503.569

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



Yogyakarta, 21 April 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,

Drs. Satrio Nugroho Yosmar Dano, M.Si.
NIP. 19700513 198903 1 001

II. NERACA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NERACA PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1	5.754.180	2.245.090.855
Belanja Dibayar di Muka	C.2	-	16.500.000
Persediaan	C.3	-	1.610.135
Jumlah Aset Lancar		5.754.180	2.263.200.990
PIUTANG JANGKA PANJANG			
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.4	8.087.500.300	8.482.999.550
Aset Tetap Lainnya	C.5	211.888.713	615.159.719
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.6	(6.220.173.759)	(5.537.216.393)
Jumlah Aset Tetap		2.079.215.254	3.560.942.876
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.7	260.125.834	131.232.874
Aset Lain-Lain	C.8	450.445.250	128.878.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.9	(598.438.462)	(215.183.244)
Jumlah Aset Lainnya		112.132.622	44.927.630
JUMLAH ASET		2.197.102.056	5.869.071.496
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.10	25.516.516	25.679.912
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.11	5.754.180	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		31.270.696	25.679.912
JUMLAH KEWAJIBAN		31.270.696	25.679.912
EKUITAS			
Ekuitas	C.12	2.165.831.360	5.843.391.584
JUMLAH EKUITAS		2.165.831.360	5.843.391.584
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.197.102.056	5.869.071.496

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Yogyakarta, 21 April 2022
 Kuasa Pengguna Anggaran,

Drs. Sc. Freding Yosmar Dano, M.Si.
 NIP. 19700513 198903 1 001

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		-	-
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	6.151.454.543	5.499.802.573
Beban Persediaan	D.3	15.519.535	812.459.454
Beban Barang dan Jasa	D.4	5.905.804.416	24.393.159.599
Beban Pemeliharaan	D.5	749.906.130	1.061.657.142
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2.631.954.492	4.004.837.503
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.210.435.584	1.373.029.904
JUMLAH BEBAN		16.665.074.700	37.144.946.175
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(16.665.074.700)	(37.144.946.175)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR		(626.179.718)	789.555
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		6.000.001	789.555
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		632.179.719	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		-	(111.963.946)
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya		-	4.475.300
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	116.439.246
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8	(626.179.718)	(111.174.391)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(17.291.254.418)	(37.256.120.566)
POS LUAR BIASA	D.9		
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	D.10	(17.291.254.418)	(37.256.120.566)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Yogyakarta, 21 April 2022
 Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah
 Drs. Screening Yosmar Dano, M.Si.
 NIP. 19700813 198903 1 001



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	E.1	5.843.391.584	6.921.224.206
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(17.291.254.418)	(37.256.120.566)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR		-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	E.3	(1.143.065.397)	-
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
Koreksi Nilai Persediaan		-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		-	-
Koreksi Lain-Lain		(1.143.065.397)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	14.756.759.591	36.178.287.944
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(3.677.560.224)	(1.077.832.622)
EKUITAS AKHIR	E.6	2.165.831.360	5.843.391.584

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Yogyakarta, 21 April 2022
Kepala Pengguna Anggaran,



Drs. Screning Kosmar Dano. M.Si.
NIP. 19700513 198903 1 001

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar hukum, Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta

*Dasar
Hukum dan
Profil
Bawaslu DIY*

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - g. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat;
 - j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- q. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.;
- r. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0517/BAWASLU/SJ/KU.02/XII/2020 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.;
- s. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tentang Pemutakhiran Akun dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- t. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-234/PB/2021 tanggal 30 September 2021 hal Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III Tahun 2021;
- u. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-115.01.2.686332/2021 Tanggal 23 November 2020.

2. Dasar Hukum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

a. Bawaslu Provinsi bertugas :

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 - a) pelanggaran Pemilu; dan
 - b) sengketa proses Pemilu.
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - a) pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - b) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - c) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 - d) penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - e) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - f) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - g) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - h) penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - i) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai PPK;
 - j) rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - k) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - l) penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi.
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - a) putusan DKPP;
 - b) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d) keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas

semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

6. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
- b. mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi

(2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
- b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
- c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
- d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.

(3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- b. memverifikasi secara formal dan materiil permohonan sengketa

- proses Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.
- b. Bawaslu Provinsi berwenang:
1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya;
 3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
 4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
 5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bawaslu Provinsi berkewajiban:
1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
 3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
 4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
 5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3. Profil Sekretariat Bawaslu Provinsi

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Provinsi secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi. Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai wewenang:

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Provinsi;
- b. Mengkoordinasikan dan menyusun program kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi;
- c. Mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
- d. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Provinsi

Sekretariat Bawaslu Provinsi diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas yaitu Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A dan Kelas B. Bawaslu DI Yogyakarta diklasifikasikan dalam Kelas B. Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas B terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat; dan
- c. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta berkedudukan di Jalan DI Panjaitan No.49 Kel.Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Yogyakarta mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan kualitas laporan Kementerian Negara/Lembaga dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen dengan visi **“Terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas”**. Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan

Kerja.

Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal ini nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka

selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap.

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang
Jangka
Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software/Aplikasi Komputer	4
Lisensi	10

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) kali. Revisi tersebut dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

- Revisi pertama pada tanggal 15 Februari 2021 adalah revisi tingkat Kanwil yang merupakan revisi Halaman III DIPA untuk Triwulan I TA 2021 serta pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) .
- Revisi kedua pada tanggal 23 April 2021 adalah revisi tingkat DJA, yang merupakan revisi antar KRO dalam rangka pemenuhan anggaran Peningkatan Kapasitas SDM berupa:
 - Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II;
 - Pelatihan Kepemimpinan Administrator; dan
 - Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.
- Revisi ketiga pada tanggal 19 Mei 2021 adalah revisi tingkat Kanwil yang merupakan revisi dalam hal penambahan Pagu sebesar Rp1.117.209.000 yang berasal dari Hibah Dalam Negeri (HDN) dalam rangka pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020.

*Tabel 1
Rincian Anggaran Semula-Menjadi Revisi Ke Tiga TA 2021*

Akun	Belanja Barang	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	-	521.890.000
521211	Belanja Bahan	-	221.311.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-	19.200.000
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	5.950.000
522141	Belanja Sewa	-	63.900.000
522191	Belanja Jasa Lainnya	-	2.450.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa	-	108.428.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	102.780.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	71.300.000
Jumlah		-	1.117.209.000

- Revisi keempat pada tanggal 3 Juni 2021 adalah revisi tingkat DJA, yang merupakan revisi terkait pemotongan anggaran sebesar Rp118.220.000 dalam rangka pemenuhan vaksin nasional sebagai bentuk dukungan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

*Tabel 2
Rincian Anggaran Semula-Menjadi Revisi Ke Empat TA 2021*

Akun	Belanja Pegawai	Anggaran Sebelum Revisi	Anggaran Setelah Revisi	Selisih
512411	Belanja pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	827.177.000	708.957.000	(118.220.000)

- Revisi kelima pada tanggal 12 Juli 2021 merupakan revisi ditingkat kanwil. Revisi DIPA dikarenakan adanya:
 - a. Perubahan halaman III DIPA dikarenakan penyesuaian dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan sepanjang triwulan tiga sampai dengan triwulan keempat Tahun Anggaran 2021;
 - b. Pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
 - c. Penyesuaian akun jenis belanja dari belanja barang menjadi belanja modal dikarenakan kebutuhan.
- Revisi Keenam pada tanggal 5 Agustus 2021 adalah revisi tingkat DJA, yang merupakan revisi terkait *refocusing* dan realokasi tahap IV Tahun 2021 dengan pemotongan anggaran kegiatan non operasional sebesar Rp643.190.000;

*Tabel 3
Rincian Anggaran Semula-Menjadi Revisi Ke Enam TA 2021*

Akun	Belanja Barang	Sebelum	Sesudah	Selisih
521211	Belanja Bahan	162.897.000	131.383.000	(31.514.000)
522192	Belanja Jasa-Penganganan Pandemi Covid-19	-	6.000.000	6.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.180.762.000	961.376.000	(219.386.000)
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.750.000	9.450.000	(6.300.000)
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	236.600.000	55.425.000	(181.175.000)
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	247.430.000	39.275.000	(208.155.000)
521213	Honor Output Kegiatan	7.980.000	5.320.000	(2.660.000)
Total		1.851.419.000	1.208.229.000	(643.190.000)

- Revisi Ketujuh pada tanggal 5 Agustus 2021 adalah revisi tingkat Kanwil, yang merupakan revisi terkait Rencana Penarikan Dana pasca adanya *refocusing* tahap IV Tahun 2021;
- Revisi kedelapan pada tanggal 21 Desember 2021 adalah revisi tingkat DJA, yang merupakan revisi pengurangan pagu sebesar Rp94.733.000 dalam rangka pemenuhan Belanja Gaji dan Tunjangan periode Desember 2021.

*Tabel 4
Rincian Anggaran Semula-Menjadi Revisi Ke Delapan TA 2021*

Akun	Keterangan	Sebelum	Sesudah	Selisih
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	658.395.000	697.805.000	39.410.000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	303.000	324.000	21.000
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	50.807.000	49.175.000	(1.632.000)
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	14.551.000	13.981.000	(570.000)
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	102.765.000	100.870.000	(1.895.000)
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	14.300.000	25.300.000	11.000.000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	85.413.000	67.784.000	(17.629.000)
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	87.308.000	91.980.000	4.672.000
511129	Belanja Uang Makan PNS	223.335.000	207.180.000	(16.155.000)

Akun	Keterangan	Sebelum	Sesudah	Selisih
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	41.014.000	27.385.000	(13.629.000)
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	4.022.083.000	4.055.642.000	33.559.000
512211	Belanja uang lembur	84.875.000	47.530.000	(37.345.000)
512411	Belanja pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	708.957.000	787.495.000	78.538.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3.193.505.000	3.259.263.000	65.758.000
521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	17.940.000	16.740.000	(1.200.000)
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	326.880.000	303.840.000	(23.040.000)
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	241.556.000	108.435.000	(133.121.000)
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	251.825.000	191.950.000	(59.875.000)
522111	Belanja Langganan Listrik	219.000.000	199.800.000	(19.200.000)
522112	Belanja Langganan Telepon	12.000.000	9.600.000	(2.400.000)
Jumlah Total		10.356.812.000	10.262.079.000	(94.733.000)

- Revisi kesembilan dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2021 dengan pagu tetap, revisi dilakukan terhadap Halaman III DIPA dan pemutakhiran POK;
- Revisi kesepuluh dilakukan pada tanggal 22 November 2021 dengan pagu tetap, revisi dilakukan terhadap Halaman III DIPA dan pemutakhiran POK;
- Revisi kesebelas dilakukan pada tanggal 13 Desember 2021 dengan pagu tetap, revisi dilakukan dalam rangka pemutakhiran POK.

Perubahan anggaran tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain sebagai berikut:

*Tabel 5
Pagu Anggaran Belanja Per 31 Desember 2021*

URAIAN	2021	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi Ke-11
APBN		
Belanja Pegawai	6.312.226.000	6.272.351.000
Belanja Barang	9.157.406.000	8.311.138.000
Belanja Modal	400.573.000	430.573.000
Jumlah	15.870.205.000	15.014.062.000
HIBAH		
Belanja Barang	-	1.117.209.000,00
Jumlah	-	1.117.209.000
TOTAL ANGGARAN	15.870.205.000	16.131.271.000

B.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.000.001. Rincian estimasi dan realisasi pendapatan Satker Sekretariat Bawaslu DI Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2021

Uraian	2021		%
	Estimasi	Realisasi	
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	-	6.000.001	-
Total	-	6.000.001	-

Realisasi Pendapatan per 30 Desember 2021 sebesar Rp6.000.001 merupakan PNBPN Bawaslu D.I. Yogyakarta yang diperoleh dari Pendapatan penjualan peralatan dan mesin melalui mekanisme lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta dengan Risalah Lelang nomor 248/42/2021 tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya hasil lelang telah disetorkan ke kas negara dengan nomor NTPN 71F8B3CIEOCDV03P tanggal 18 Juni 2021 senilai Rp6.000.001.

Realisasi Pendapatan Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6.000.001 dan Rp2.974.555 atau mengalami kenaikan sebesar 101,71% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik (Turun) %
Pengembalian Belanja Pegawai TAYL	-	2.185.000	(100,00)
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	6.000.001	789.555	659,92
JUMLAH BELANJA	6.000.001	2.974.555	101,71

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2021 adalah sebesar Rp15.864.785.050 atau 98,35% dari anggaran belanja sebesar Rp16.131.271.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021

URAIAN	TA 2021		
	ANGGARAN	REALISASI	% real
			Angg.
Belanja Pegawai	6.272.351.000	6.149.070.468	98,03
Belanja Barang	9.428.347.000	9.295.022.721	98,59
Belanja Modal	430.573.000	428.092.673	99,42
Jumlah Bruto	16.131.271.000	15.872.185.862	98,39
Pengembalian Belanja	-	7.400.812	
Jumlah Total	16.131.271.000	15.864.785.050	98,35

Realisasi Belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar 54,68% dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya kebijakan APBN TA 2021 sebagaimana arahan Presiden RI dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi *COVID-19*, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui penghematan belanja, sehingga pagu anggaran Bawaslu D.I.Yogyakarta TA 2021 relatif kecil;
2. Pada TA 2021 masa tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 hanya selama 3 bulan saja yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret, sedangkan pada tahun 2020 selama 12 bulan dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember;
3. Adanya *refocusing* yang mengakibatkan pemotongan pada anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal;

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	Realisasi		% Naik (Turun)
	2021	2020	
Belanja Pegawai	6.149.070.468	5.502.386.753	11,75
Belanja Barang	9.295.022.721	29.044.898.091	(68,00)
Belanja Modal	428.092.673	461.802.905	(7,30)
Jumlah Bruto	15.872.185.862	35.009.087.749	(54,66)
Pengembalian Belanja	7.400.812	2.584.180	186,39
Jumlah Total	15.864.785.050	35.006.503.569	(54,68)

Realisasi belanja sebesar Rp15.864.785.050 merupakan realisasi belanja bruto sebesar Rp15.872.185.862 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp7.400.812.

Pengembalian Belanja sebesar Rp7.400.812 merupakan pengembalian belanja tahun anggaran berjalan yang terdiri dari:

Tabel 10
Pengembalian Belanja Per 31 Desember 2021

KODE	URAIAN	JUMLAH
51	Belanja Pegawai	
511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.112
511123	Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural PNS	2.940.200
511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	1.095.000
	Jumlah	4.036.312
52	Belanja Barang	
521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	2.137.500
524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	1.227.000
	Jumlah	3.364.500
	Jumlah Total Pengembalian	7.400.812

Belanja Pegawai
Rp6.145.034.156

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6.145.034.156 dan Rp5.499.802.573. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 11,73% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pembahan pegawai CPNS Organik Bawaslu TA 2020 sebanyak 6 orang TMT 1 Desember 2020 dengan alokasi jabatan sebagai: Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Analis BMN, Analis Materi Sidang, Analis Perencanaan Anggaran, Analis Hubungan Antar Lembaga, Analis Hukum dan mulai dibayarkan gaji dari Bawaslu D.I.Yogyakarta bulan Oktober 2021;
2. Adanya perubahan status pegawai yang menikah dan mempunyai anak sehingga menambah belanja tunjangan suami/istri PNS dan tunjangan anak PNS;
3. Pembayaran kenaikan gaji sehubungan dengan dilantiknya beberapa Staf PNS Bawaslu D.I. Yogyakarta menjadi pejabat fungsional pada bulan April 2021;
4. Adanya kenaikan pangkat PNS di bulan Oktober 2021.

Tabel 11
Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	677.222.760	471.810.340	43,54
Belanja Pembulatan Gaji PNS	13.345	8.442	58,08
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	35.331.538	16.705.622	111,49
Belanja Tunjangan Anak PNS	9.692.392	4.502.252	115,28

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Tunjangan Struktural PNS	95.970.000	65.265.000	47,05
Belanja Junjangan Fungsional PNS	25.860.000	0	100,00
Belanja Tunjangan PPh PNS	60.724.066	38.274.475	58,65
Belanja Tunjangan Beras PNS	35.847.900	19.408.560	84,70
Belanja Uang Makan PNS	180.005.400	185.471.000	(2,95)
Belanja Tunjangan Umum PNS	26.310.000	21.135.000	24,49
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	4.013.459.600	4.009.354.100	0,10
Belanja Uang Lembur	193.730.000	91.505.000	111,72
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	794.903.467	578.946.962	37,30
Jumlah	6.149.070.468	5.502.386.753	11,75
Pengembalian Belanja	4.036.312	2.584.180	56,19
JUMLAH BELANJA	6.145.034.156	5.499.802.573	11,73

Pengembalian Belanja sebesar Rp4.036.312 yang terdiri dari:

- Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp1.112 dengan rincian:
 - SP2D nomor 210301303011696 tanggal 08/07/2021 senilai Rp656;
 - SP2D nomor 210301303011695 tanggal 08/07/2021 senilai Rp173;
 - SP2D nomor 210301303020042 tanggal 18/10/2021 senilai R183;
 - SP2D nomor 210301303020388 tanggal 22/10/2021 senilai Rp64;
 - SP2D nomor 210301303020558 tanggal 26/10/2021 senilai Rp28;
 - SP2D nomor 210301303025545 tanggal 10/12/2021 senilai Rp8.
- Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural PNS sebesar Rp2.940.200 dengan rincian:
 - SP2D nomor 210301303020041 tanggal 18/10/2021 senilai Rp2.450.200;
 - SP2D nomor 210301303020388 tanggal 22/12/2021 senilai Rp490.000.
- Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS senilai Rp1.095.000 dengan rincian:
 - SP2D nomor 210301303020388 tanggal 22/12/2021 senilai Rp365.000;
 - SP2D nomor 210301303020041 tanggal 18/12/2021 senilai Rp730.000.

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.145.034.156 seluruhnya berasal dari APBN dipergunakan untuk:

- Pembayaran gaji PNS Bulan Januari s.d Desember 2021;
- Pembayaran tunjangan struktural Bulan Januari s.d. Desember 2021;
- Pembayaran uang makan PNS Bulan Januari s.d. Desember 2021;
- Pembayaran Uang lembur dan uang makan lembur Bulan Januari s.d. Desember 2021;
- Pembayaran uang kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Bulan Januari s.d. Desember 2021;
- Pembayaran tunjangan kinerja PNS Bulan Januari s.d. Desember 2021;
- Pembayaran THR dan gaji ketiga belas PNS Tahun 2021;
- Pembayaran THR dan gaji ketiga belas Uang Kehormatan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2021; dan
- Pembayaran gaji ketiga belas Uang Kehormatan Bawaslu Provinsi 2021.

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp9.291.658.221 dan Rp29.044.898.091. Belanja Barang TA 2021 mengalami penurunan 68,01% dari realisasi Belanja Barang TA 2020. Hal ini antara lain disebabkan karena pagu anggaran yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan TA 2020 dan adanya *refocusing* serta pemotongan anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Selain itu pelaksanaan pengawasan tahapan Pilkada serentak TA 2020 sudah berakhir pada TA 2021.

Pengembalian Belanja sebesar Rp3.364.500 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja sebesar Rp2.137.500 telah disetorkan pada tanggal 28 Desember 2021 dengan nomor NTPN: 808F048VUJH0MLOS merupakan pengembalian Honor PPSPM a.n Mutia Utami bulan Januari- Maret 2021;
2. Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa sebesar Rp1.227.000 telah di setorkan pada tanggal 28 Desember 2021 dengan nomor NTPN: 4FEC51JNF3PRFO6T merupakan pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas a.n Ria Harlinawati sebesar Rp564.000 dan Panggih Widodo sebesar Rp663.000.

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	4.344.430.585	15.271.978.619	(71,55)
Belanja Barang Non Operasional	766.621.575	5.124.319.219	(85,04)
Belanja Barang Persediaan	13.909.400	349.596.900	(96,02)
Belanja Jasa	785.623.539	3.233.858.708	(75,71)
Belanja Pemeliharaan	749.906.130	1.061.657.142	(29,36)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.634.531.492	4.003.487.503	(34,19)
Jumlah	9.295.022.721	29.044.898.091	(68,00)
Pengembalian Belanja	3.364.500	0	100,00
JUMLAH BELANJA	9.291.658.221	29.044.898.091	(68,01)

Dari Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.291.658.221 terdapat realisasi belanja yang digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 senilai Rp230.788.432 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13
Realisasi Belanja Penanganan Pandemi COVID-19 per 31 Desember 2021

Kode	Uraian	31-Des-21
521131	Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	171.822.532
521841	Belanja Barang Persediaan-Penanganan Pandemi COVID-19	2.176.900
522192	Belanja Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19	56.789.000
	Jumlah Belanja Kotor	230.788.432
	Pengembalian Belanja	0
	Jumlah Belanja Bersih	230.788.432

Belanja Barang dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dipergunakan untuk:

1. Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 senilai Rp171.822.532 merupakan belanja pengadaan masker, cairan desinfektan, dan biaya komunikasi dalam bentuk pulsa/paket data internet yang dibayarkan s.d bulan September 2021;
2. Belanja Barang Persediaan-Penanganan Pandemi COVID-19 senilai Rp2.176.900 merupakan pengadaan *hand sanitizer* untuk persediaan;
3. Belanja Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19 senilai Rp56.789.000 merupakan biaya pelaksanaan rapid test dan PCR oleh pihak ketiga.

B.4.1 Belanja Barang (RM)

Realisasi Belanja Barang (RM) per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp8.189.632.763 dan Rp10.677.393.046. Realisasi Belanja Barang (RM) per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 23,30% dikarenakan adanya *refocusing* serta pemotongan anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Adanya penurunan belanja barang persediaan dan belanja jasa karena telah berakhirnya masa tahapan Pilkada 2020 pada TA 2021.

Tabel 14
Perbandingan Belanja Barang (RM) per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	3.824.140.585	4.566.423.037,0	(16,26)
Belanja Barang Non Operasional	532.082.675	438.379.718,0	21,37
Belanja Barang Persediaan	13.909.400	349.596.900,0	(96,02)
Belanja Jasa	714.069.339	2.156.553.313,0	(66,89)
Belanja Pemeliharaan	749.906.130	1.000.460.213,0	(25,04)
Belanja Perjalanan Dalam Negri	2.358.889.134	2.165.979.865,0	8,91
Jumlah Belanja Kotor	8.192.997.263	10.677.393.046	(23,27)
Jumlah Pengembalian	3.364.500	0	100,00
Jumlah Belanja Bersih	8.189.632.763	10.677.393.046	(23,30)

Realisasi Belanja Barang (RM) per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.192.997.263 dipergunakan untuk:

1. Belanja Barang Operasional merupakan pembayaran belanja keperluan perkantoran, belanja pengiriman surat dinas pos pusat, belanja honor operasional satuan kerja, belanja barang operasional lainnya dan belanja barang operasional – penanganan Pandemi COVID-19 di lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta sampai dengan bulan Desember 2021;
2. Belanja Barang Non Operasional merupakan pembayaran belanja bahan dan belanja honor output kegiatan sampai dengan bulan Desember 2021;
3. Belanja Barang Persediaan merupakan pembayaran belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja persediaan penanganan Pandemi COVID-19 di lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta sampai dengan bulan Desember 2021;

4. Belanja Jasa merupakan pembayaran belanja langganan langganan listrik, belanja langganan telepon, belanja langganan air, belanja daya dan jasa lainnya, belanja langganan sewa, belanja langganan profesi dan belanja jasa lainnya serta belanja jasa penanganan pandemi COVID-19 di lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta sampai dengan bulan Desember 2021;
5. Belanja Pemeliharaan merupakan pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dan pemeliharaan peralatan dan mesin sampai dengan bulan Desember 2021;
6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan pembayaran atas belanja perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas dalam kota, perjalanan dinas paket meeting dalam kota dan perjalanan dinas paket meeting luar kota dalam rangka menjalankan tugas kelembagaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan bulan Desember 2021.

Belanja Barang (RM) sebesar Rp8.189.632.763 merupakan hasil pengurangan dari Realisasi Belanja Barang Bruto sebesar Rp8.192.997.263 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp3.364.500. Adapun Rincian Pengembalian belanja (RM) sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Pengembalian Belanja Barang (RM) TA 2021

Kode	Uraian	Jumlah
521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	2.137.500
524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	1.227.000
	Jumlah	3.364.500

Dari Realisasi Belanja Barang (RM) sebesar Rp8.189.632.763 terdapat realisasi belanja yang digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp230.788.432 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16
Realisasi Belanja Penanganan Pandemi COVID-19 dari Sumber RM per 31 Desember 2021

Kode	Uraian	31-Des-21
521131	Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	171.822.532
521841	Belanja Barang Persediaan-Penanganan Pandemi COVID-19	2.176.900
522192	Belanja Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19	56.789.000
	Jumlah Belanja Kotor	230.788.432
	Pengembalian Belanja	0
	Jumlah Belanja Bersih	230.788.432

Belanja Barang (RM) dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dipergunakan untuk:

1. Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 senilai Rp171.822.532 merupakan belanja pengadaan masker, cairan desinfektan, dan biaya komunikasi dalam bentuk pulsa/paket data internet yang dibayarkan s.d bulan September 2021;
2. Belanja Barang Persediaan-Penanganan Pandemi COVID-19 senilai Rp2.176.900

merupakan pengadaan hand sanitizer untuk persediaan;

3. Belanja Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19 senilai Rp56.789.000 merupakan biaya pelaksanaan rapid test dan PCR oleh pihak ketiga.

B.4.2 Belanja Barang (HDN)

Realisasi Belanja Barang (HDN) per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp1.102.025.458 dan Rp18.367.505.045. Realisasi Belanja Barang (HDN) per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 94,00% dikarenakan masa tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada tahun 2021 hanya berlangsung tiga bulan saja yaitu pada bulan Januari s.d. Maret 2021.

Tabel 17
Realisasi Belanja Barang (HDN) per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-21	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	520.290.000	10.705.555.582	(95,14)
Belanja Barang Non Operasional	234.538.900	4.685.939.501	(94,99)
Belanja Jasa	71.554.200	1.077.305.395	(93,36)
Belanja Pemeliharaan	0	61.196.929	(100,00)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	275.642.358	1.837.507.638	(85,00)
Jumlah Bruto	1.102.025.458	18.367.505.045	(94,00)
Pengembalian belanja	0	0	
Jumlah Bersih	1.102.025.458	18.367.505.045	(94,00)

Realisasi Belanja Barang (HDN) per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.102.025.458 dipergunakan untuk:

1. Belanja Barang Operasional merupakan pembayaran belanja keperluan perkantoran, belanja honor operasional satuan kerja, dan belanja barang operasional lainnya;
2. Belanja Barang Non Operasional merupakan pembayaran belanja bahan dan belanja honor output kegiatan;
3. Belanja Jasa merupakan pembayaran belanja langganan langganan listrik, belanja langganan telepon, belanja langganan air, dan sewa sarana prasarana perkantoran seperti laptop, printer dan mesin fotocopy;
4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan pembayaran atas belanja perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas dalam kota, perjalanan dinas paket meeting dalam kota dalam rangka pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan kabupaten Gunungkidul.

Belanja Modal
Rp428.092.673

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp428.092.673 dan Rp461.802.905. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal TA 2021 mengalami penurunan sebesar 7,30% dibandingkan TA

2020 disebabkan oleh pembatasan proporsi anggaran belanja modal (53) serta adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran belanja modal dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19.

Tabel 18
Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 2020

Akun	URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.311.000	0	100,00
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Penanganan Pandemi COVID-19	0	10.228.000	(100,00)
536111	Belanja Modal Lainnya	340.781.673	54.750.000	522,43
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	0	396.824.905	(100,00)
	Jumlah	428.092.673	461.802.905	(7,30)
	Pengembalian Belanja	0	0	
	Total	428.092.673	461.802.905	(7,30)

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp87.311.000

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode yang berakhir 30 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp87.311.000 dan Rp10.228.000 mengalami kenaikan sebesar 753,65%. Realisasi sebesar Rp87.311.000 adalah belanja modal peralatan dan mesin berupa A.C Split, Hardisk Portabel, Paket Audio potcast, Lensa Kamera, Lemari es dan Voice Recorder.

Tabel 19
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan mesin	87.311.000	10.228.000	753,65
Jumlah Bruto	87.311.000	10.228.000	753,65
Pengembalian Belanja	0	0	
Total	87.311.000	10.228.000	753,65

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	Unit
Lemari Es	3.450.000	1 Unit
AC Split	49.925.000	10 Unit
Voice Recorder	1.375.000	1 Unit
Peralatan Studio Audio Lainnya	3.366.000	1 Unit
Lensa Kamera	20.845.000	1 Unit
External/Portable hardisk	8.350.000	1 Unit
Jumlah	87.311.000	

Belanja Modal Peralatan dan mesin berupa AC Split per 31 Desember 2021 telah direalisasikan sebanyak 10 (sepuluh) unit yang ditempatkan di:

- Bawaslu D.I. Yogyakarta sebanyak 5 (lima) unit;

- Bawaslu Kabupaten Kulonprogo sebanyak 2 (dua) unit;
- Bawaslu Kabupaten Sleman sebanyak 1 (satu) unit; dan
- Bawaslu Kota Yogyakarta sebanyak 2 (dua) unit;

Belanja Modal Peralatan dan mesin Lemari Es, Voice Recorder, Peralatan Peralatan Studio Audio Lainnya, Lensa Kamera, Eksternal/Portabel Hardisk ditempatkan di Bawaslu D.I.Yogyakarta.

Belanja Modal
Lainnya
Rp340.781.673

B.5.2 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp340.781.673 dan Rp54.750.000 atau naik sebesar 522,43%. Perbandingan realisasi belanja modal lainnya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 21
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	340.781.673	54.750.000	522,43
Jumlah	340.781.673	54.750.000	522,43

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	211.888.713
Software Komputer	29.902.960
Pengembangan Software Komputer	98.990.000
Jumlah	340.781.673

Rincian Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi per 31 Desember 2021

Uraian	Nomor SPK	Tanggal SPK	Nilai
Renovasi Atap Gedung dan Plafond	053/PL.06/YO/02/2021	18/02/2021	78.822.150
Renovasi Atap Gedung Kantor	082.A/PL.06/YO/04/2021	08/04/2021	88.167.423
Renovasi Plafond Teras Kantor	120.A/PL.06/YO/06/2021	02/06/2021	44.899.140
Jumlah			211.888.713

Rincian Software Komputer per 31 Desember 2021 senilai Rp29.902.960 dengan rincian sebagai berikut:

- Aplikasi SIJUWARA dapat diakses pada laman <https://sijuwara.yogyakarta.bawaslu.go.id/> ;
- Aplikasi SAMAWA dapat diakses pada laman samawa-diy.online.com ;
- Aplikasi E-SPP dapat diakses pada laman <https://e-spp.blangkonstudio.com/> .

Tabel 24
Rincian Software Komputer per 31 Desember 2021

Uraian	Nomor SPK/Bukti	Tanggal SPK/Bukti	Nilai
Aplikasi SIJUWARA	007.A/TI.02.01/YO/09/2021	19/07/2021	23.202.960
Aplikasi SAMAWA	001755	08/12/2021	3.350.000
Aplikasi E-SPP	001754	08/12/2021	3.350.000
Jumlah			29.902.960

Pengembangan Nilai Aset per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp98.990.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25
Rincian Pengembangan Nilai Aset per 31 Desember 2021

Uraian	Alamat ID	31-Des-21
Website Bawaslu D.I.Yogyakarta	www.yogyakarta.bawaslu.go.id	50.000.000
Website Bawaslu Kota Yogyakarta	https://yogyakartakota.bawaslu.go.id/	9.800.000
Website Bawaslu Kabupaten Sleman	https://sleman.bawaslu.go.id/	9.800.000
Website Bawaslu Kabupaten Bantul	https://bantul.bawaslu.go.id/	9.800.000
Website Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	https://gunungkidul.bawaslu.go.id/	9.800.000
Website Bawaslu Kabupaten Kulon Progo	https://kulonprogo.bawaslu.go.id/	9.790.000
Jumlah		98.990.000

Rincian pengembangan nilai aset adalah sebagai berikut:

- Website Bawaslu D.I.Yogyakarta dilakukan pengembangan dengan perbaikan tampilan dan penambahan fitur-fitur serta update beberapa tools keamanan antara lain: Spesifikasi Website (Design & Kode Program), Database MySql, Content Website (profil, publikasi, berita, sitemap) Auto Konten Gallery, Fitur pendukung (Security) dan PPID;
- Website Bawaslu Kota Yogyakarta dilakukan pengembangan pada Website profil & PPID antara lain pada Spesifikasi System Web, Content Web Profile, Content Web PPID, Fitur pendukung (Security, SEO, Link & share social media; Link ke website lain);
- Website Bawaslu Kabupaten Sleman dilakukan pengembangan pada desain web utama Bawaslu Kabupaten Sleman, perbaikan fitur layanan pengaduan dan peningkatan security web;
- Website Bawaslu Kabupaten Bantul dilakukan pengembangan pada integrasi website utama lembaga dengan website PPID, fitur pengecekan progres permohonan informasi dan keberatan informasi publik, dan notifikasi permohonan dan keberatan informasi publik;
- Website Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dilakukan dengan mengganti script pada situs utama dan situs PPID;
- Website Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dilakukan pengembangan pada layout header, penambahan fitur pada content dan layout footer.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp0*

C.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp5.754.180 dan Rp2.245.090.855. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Kas Lainnya dan setara kas yang ada di Bawaslu D.I. Yogyakarta per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.754.180 merupakan pajak yang belum disetor oleh Bendahara Pengeluaran. Rincian kas lainnya dan setara kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Tabel 26
Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga	5.754.180	2.245.090.855
JUMLAH	5.754.180	2.245.090.855

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp0*

C.2 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp16.500.000. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Tabel 27
Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Belanja Dibayar di Muka	-	16.500.000
Jumlah	-	16.500.000

*Persediaan
Rp0*

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp1.610.135. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

*Tabel 28
Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Persediaan	-	1.610.135
JUMLAH	-	1.610.135

Nilai Persediaan senilai Rp0 berdasarkan BA Cek Fisik Persediaan Nomor: 005.A/PL.07/YO/01/2022 tanggal 3 Januari 2022. Mutasi persediaan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 29
Mutasi Persediaan per 31 Desember 2021

Saldo Per 31 Desember 2020	1.610.135
Mutasi Tambah:	
Pembelian	13.909.400
Mutasi Kurang:	
Pemakaian Persediaan	(15.519.535)
Saldo per 31 Desember 2021	0

Mutasi tambah Beban Persediaan berupa Realisasi Belanja Barang Persediaan senilai Rp13.909.400 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30
Mutasi Tambah Pembelian Persediaan TA 2021

TGL. BUKU	KODE BARANG	NAMA BARANG	TOTAL
10-03-2021	1010314001000004	Handsantizer	165.000
25-03-2021	1010314001000004	Handsantizer II	107.000
21-10-2021	1010301001000001	pulpen	521.500
21-10-2021	1010301001000002	Pensil	60.000
21-10-2021	1010301006000001	Ordner	840.000
21-10-2021	1010301006000002	Stopmap	422.000
21-10-2021	1010301012000001	Staples	422.000
21-10-2021	1010301013000001	Isi Staples	210.000
21-10-2021	1010301999000001	tipex	233.500
21-10-2021	1010301999000002	Binder Clip	1.130.000
21-10-2021	1010301999000003	Post It Sign Here	105.000
21-10-2021	1010301999000004	Lem	75.000
21-10-2021	1010301999000005	Stamp Pad	37.500
21-10-2021	1010301999000006	Rautan	50.000
21-10-2021	1010301999000007	Tempat Pensil	126.000
21-10-2021	1010301999000008	Gunting	48.000
21-10-2021	1010301999000009	Calculator	140.000
21-10-2021	1010301999000010	Label	180.000
21-10-2021	1010301999000011	Lakban	432.000
21-10-2021	1010302001000001	Kertas	1.730.000
21-10-2021	1010302004000001	Amplop	350.000
21-10-2021	1010304004000001	Tinta Printer	1.325.000
21-10-2021	1010304006000001	Flashdisk	2.290.000
21-10-2021	1010304006000002	USB	195.000
21-10-2021	1010304008000001	CD	90.000
21-10-2021	1010304010000001	Mouse	720.000

TGL. BUKU	KODE BARANG	NAMA BARANG	TOTAL
09-11-2021	1010314001000004	Handsanitizer	562.500
02-12-2021	1010314001000004	Handsanitizer	1.342.400
Jumlah			13.909.400

Mutasi Kurang Barang Persediaan senilai Rp15.519.535 merupakan pemakaian persediaan dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel 31
Mutasi Kurang Barang Persediaan TA 2021*

TGL. BUKU	KODE BARANG	NAMA BARANG	TOTAL
18-01-2021	1010314001000003	Hand Sanitizer III	45.000
18-01-2021	1010307004000003	Sarung Tangan I	514.250
18-01-2021	1010307002000003	Masker I	290.400
18-01-2021	1010307002000007	kaca mata medis	290.400
18-01-2021	1010307005000002	Boot I	470.085
07-05-2021	1010314001000002	Hand Sanitizer II	107.000
10-05-2021	1010314001000004	Handsanitizer	165.000
29-10-2021	1010301006000002	Stopmap	422.000
29-10-2021	1010301999000002	Binder Clip	1.130.000
29-10-2021	1010301013000001	Isi Staples	210.000
29-10-2021	1010301001000001	pulpen	521.500
29-10-2021	1010301999000010	Label	180.000
29-10-2021	1010302001000001	Kertas	1.730.000
29-10-2021	1010301006000001	Ordner	840.000
29-10-2021	1010301999000011	Lakban	432.000
29-10-2021	1010302004000001	Amplop	350.000
29-10-2021	1010301001000002	Pensil	60.000
29-10-2021	1010301012000001	Staples	422.000
29-10-2021	1010301999000001	tipex	233.500
29-10-2021	1010304004000001	Tinta Printer	1.325.000
29-10-2021	1010304006000001	Flashdisk	2.290.000
29-10-2021	1010304008000001	CD	90.000
29-10-2021	1010304010000001	Mouse	720.000
29-10-2021	1010301999000003	Post It Sign Here	105.000
29-10-2021	1010301999000004	lem	75.000
29-10-2021	1010301999000006	Rautan	50.000
29-10-2021	1010301999000007	Tempat Pensil	126.000
29-10-2021	1010301999000005	Stamp Pad	37.500
29-10-2021	1010301999000008	Gunting	48.000
29-10-2021	1010304006000002	USB	195.000
29-10-2021	1010301999000009	Calculator	140.000
29-11-2021	1010314001000004	Handsanitizer	562.500
30-12-2021	1010314001000004	Handsanitizer	1.342.400
Total			15.519.535

*Peralatan dan
Mesin
Rp8.087.500.
300*

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp8.087.500.300 dan Rp8.482.999.550 . Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021

Uraian	Saldo per 31 Desember 2021
Transportable Generating Set	74.415.000
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3.376.866.000
Sepeda Motor	47.371.500
Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1.944.000
Lemari Besi/Metal	161.348.500
Lemari Kayu	88.111.500
Filing Cabinet Besi	140.581.000
Brandkas	56.694.500
Buffet	9.960.000
Tabung Pemadam Api	45.305.000
CCTV - Camera Control Television System	9.975.000
White Board	21.680.000
Alat Penghancur Kertas	13.070.000
Mesin Absensi	8.650.000
LCD Projector/Infocus	226.160.000
Focusing Screen/Layar LCD Projector	6.200.000
Meja Kerja Kayu	443.077.800
Kursi Besi/Metal	389.082.000
Kursi Kayu	13.250.000
Sice	184.888.000
Meja Rapat	79.259.500
Sketsel	12.000.000
Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1.485.000
Lemari Es	8.400.000
A.C. Split	506.848.000
Televisi	82.400.000
Sound System	88.900.000
Wireless	8.002.500
Camera Video	31.425.000
Tiang Bendera	3.200.000
Dispenser	52.130.000
Handy Cam	39.450.000
Alat Rumah Tangga Lainnya	550.000
Microphone/Wireless MIC	12.805.000
Voice Recorder	25.721.000
Peralatan Studio Audio Lainnya	3.366.000
Lensa Kamera	20.845.000
Camera Digital	164.950.500
Pesawat Telephone	11.341.800
Handy Talky (HT)	12.900.000
Facsimile	3.990.000
Telepon Lapangan	15.750.000
Alat Komunikasi Digital Dan Konvensional Lainnya	44.800.000
Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	10.228.000
P.C Unit	615.325.000

Uraian	Saldo per 31 Desember 2021
Lap Top	533.274.120
Note Book	-
Printer (Peralatan Personal Komputer)	198.304.080
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	111.120.000
External/ Portable Hardisk	13.100.000
Server	57.000.000
TOTAL	8.087.500.300

Sedangkan Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021

Saldo Per 31 Desember 2020	8.482.999.550
Mutasi Tambah:	
Pembelian	87.311.000
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Aset Tetap Ke Aset Lainnya	(482.810.250)
Saldo per 31 Desember 2021	8.087.500.300
Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	(6.220.173.759)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	1.867.326.541

Mutasi tambah peralatan dan mesin senilai Rp87.311.000 berupa pembelian atas belanja modal peralatan dan mesin dengan rincian:

1. Pembelian Lemari Es sejumlah 1 unit senilai Rp3.450.000;
2. Pembelian AC Split sejumlah 10 Unit senilai Rp49.925.000 ;
3. Pembelian Voice Recorder sejumlah 1 Unit senilai Rp1.375.000;
4. Pembelian Peralatan Studio Audio Lainnya berupa paket audio potcast sejumlah 1 Unit senilai Rp3.366.000;
5. Pembelian Lensa Kamera sejumlah 1 Unit senilai Rp20.845.000;
6. Pembelian External/Portable hardisk sejumlah 1 unit senilai Rp8.350.000;

Mutasi kurang peralatan dan mesin senilai Rp482.810.250 merupakan Reklasifikasi Aset Tetap Ke Aset Lainnya yaitu penghentian aset dari penggunaan dikarenakan rusak berat dan telah diajukan surat Permohonan Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara kepada Pengguna Barang nomor 196/PL.08/YO/11/2021 tanggal 29 November 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34
Daftar Barang Yang Dihentikan Penggunaannya Karena Rusak Berat TA 2021

Nama Barang	Jumlah (unit)	Nilai
Mesin Ketik Elektronik/Selektik	1	1.944.000
White Board	1	797.000
Alat Penghancur Kertas	2	2.250.000

Nama Barang	Jumlah (unit)	Nilai
Mesin Absensi	1	7.997.000
Meja Kerja Kayu	6	13.890.600
Kursi Besi/Metal	5	7.025.250
Lemari Es	2	3.300.000
A.C. Split	2	11.555.000
Wireless	1	8.002.500
Camera Digital	8	69.900.000
Pesawat Telephone	2	20.000.000
Facsimile	1	1.590.000
P.C Unit	6	65.700.000
Lap Top	20	154.554.500
Note Book	1	10.000.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	40.380.400
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	63.924.000
JUMLAH	76	482.810.250

Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin berdasarkan rincian per sub kelompok barang per 31 Desember 2021 disajikan sebagai berikut:

*Tabel 35
Penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2021*

Uraian	Saldo per 31 Desember 2021
Electric Generating Set	47.838.213
Kendaraan Bermotor Penumpang	2.201.268.006
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	47.371.500
Mesin Ketik	1.944.000
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	387.001.850
Alat Kantor Lainnya	268.798.900
Meubelair	933.358.890
Alat Pembersih	1.485.000
Alat Pendingin	406.734.000
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	266.707.500
Alat Rumah Tangga Lainnya	550.000
Peralatan Studio Audio	32.221.200
Peralatan Studio Video Dan Film	147.597.500
Alat Komunikasi Telephone	43.181.800
Alat Komunikasi Digital Dan Konvensional	40.320.000
Alat Kedokteran Umum	3.068.400
Personal Komputer	1.040.443.230
Peralatan Personal Komputer	298.283.770
Peralatan Jaringan	52.000.000
Jumlah	6.220.173.759

C.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap

Lainnya periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp211.888.713 dan Rp615.159.719. Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2021 berupa Aset Tetap Renovasi yang merupakan Renovasi gedung BP4 (Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru) yang merupakan kantor baru Bawaslu D.I. Yogyakarta yang mulai aktif digunakan oleh Bawaslu D.I. Yogyakarta pada bulan Juli 2019. Renovasi gedung yang merupakan aset tetap milik Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta ini bertujuan untuk mendukung sarana dan prasarana kegiatan operasional perkantoran sehari-hari. Aset tetap lainnya tersebut berupa Aset Tetap Renovasi Gedung dan Bangunan dengan mutasi sebagai berikut:

Tabel 36
Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021

Saldo per 31 Desember 2020	615.159.719
Mutasi Tambah:	
Pembelian	211.888.713
Mutasi Kurang:	-
Penghapusan BMN Hibah Keluar	(615.159.719)
Saldo per 31 Desember 2021	211.888.713
Akumulasi penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	211.888.713

Mutasi tambah aset tetap lainnya berupa pembelian diperoleh dari belanja modal akun 536111 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37
Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021

Uraian	Keterangan	Nilai
Paket 1	Renovasi Atap Gedung dan Plafond	78.822.150
Paket 2	Renovasi Atap Gedung Kantor	88.167.423
Paket 3	Renovasi Plafond Teras Kantor	44.899.140
JUMLAH		211.888.713

Aset tetap lainnya berupa Gedung dan Bangunan dalam Renovasi tersebut saat ini sudah dipindah tangankan melalui hibah kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan surat perjanjian hibah Nomor P.202/PL.04/YO/12/2021 dan Nomor 38/PERJ/SEKDA/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 dan Berita Acara Serah Terima Nomor P.203/PL.04/YO/12/2021 dan Nomor 7/BA/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya akan diajukan surat permohonan SK Penghapusan kepada Pengguna Barang.

Mutasi kurang aset tetap lainnya berupa penghapusan BMN yang dihibahkan ke Pemda dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38
Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021

Uraian	Keterangan	Nilai
Paket 1	Hibah BMN berupa ATR Bawaslu DIY kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, BAST Nomor 060/PL.04/YO/03/2021 dan Nomor 028/727 tanggal 1 Maret 2021;	119.000.000
Paket 2	Hibah BMN berupa ATR Bawaslu DIY kepada Pemerintah Daerah DIY, BAST Nomor P.064.B/PL.04/YO/03/2021 dan Nomor 1/BA/III/2021 tanggal 15 Maret 2021;	277.824.905
Paket 3	Hibah BMN berupa ATR Bawaslu DIY kepada Pemerintah Daerah DIY, BAST Nomor 090.B/PL.04/YO/04/2021 dan Nomor 3/BA/IX/2021 tanggal 16 April 2021.	218.334.814
JUMLAH		615.159.719

Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya senilai Rp615.159.719 merupakan renovasi gedung kantor yang mengakibatkan penambahan nilai aset gedung tersebut. Karena gedung kantor saat ini merupakan milik Pemerintah Daerah sehingga penambahan nilai aset dari renovasi gedung tersebut perlu diserahkan melalui hibah dan telah dihapuskan sesuai Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum:

- Nomor 0150/PL.08/SJ/04/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Renovasi pada Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta senilai Rp119.000.000.
- Nomor 0167.A/PL.08/SJ/05/2021 tanggal 10 Mei 2021 perihal Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Renovasi pada Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta senilai Rp496.159.719;

*Akumulasi
Penyusutan Ase
Tetap
Rp6.220.173.75
9*

C.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp6.220.173.759 dan Rp5.537.216.393. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 39
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Peralatan dan Mesin	6.220.173.759	5.537.216.393
Akumulasi Penyusutan		6.220.173.759	5.537.216.393

Tabel 40
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021

Uraian	Saldo per 31 Desember 2021
Transportable Generating Set	47.838.213
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2.201.268.006
Sepeda Motor	47.371.500
Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1.944.000
Lemari Besi/Metal	126.029.650
Lemari Kayu	79.597.350
Filing Cabinet Besi	118.692.400
Brandkas	52.722.450
Buffet	9.960.000
Tabung Pemadam Api	41.405.000
CCTV - Camera Control Television System	4.987.500
White Board	18.818.900
Alat Penghancur Kertas	8.382.500
Mesin Absensi	4.325.000
LCD Projector/Infocus	187.780.000
Focusing Screen/Layar LCD Projector	3.100.000
Meja Kerja Kayu	351.625.440
Kursi Besi/Metal	318.990.700
Kursi Kayu	6.625.000
Sice	170.446.200
Meja Rapat	73.671.550
Sketsel	12.000.000
Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1.485.000
Lemari Es	5.295.000
A.C. Split	401.439.000
Televisi	77.700.000
Sound System	67.150.000
Wireless	8.002.500
Camera Video	25.875.000
Tiang Bendera	1.600.000
Dispenser	48.455.000
Handy Cam	37.925.000
Alat Rumah Tangga Lainnya	550.000
Microphone/Wireless MIC	8.963.500
Voice Recorder	22.584.500
Peralatan Studio Audio Lainnya	673.200
Lensa Kamera	2.084.500
Camera Digital	145.513.000
Pesawat Telephone	10.541.800
Handy Talky (HT)	12.900.000
Facsimile	3.990.000
Telepon Lapangan	15.750.000
Alat Komunikasi Digital Dan Konvensional Lainnya	40.320.000
Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	3.068.400
P.C Unit	594.585.000
Lap Top	445.858.230

Uraian	Uraian
Note Book	-
Printer (Peralatan Personal Komputer)	194.276.270
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	97.170.000
External/ Portable Hardisk	6.837.500
Server	52.000.000
JUMLAH	6.220.173.759

Tabel 41
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	8.087.500.300	6.220.173.759	1.867.326.541
2	Aset Tetap Lainnya	211.888.713	-	211.888.713
Total		8.299.389.013	6.220.173.759	2.079.215.254

Rincian nilai perolehan, beban penyusutan, akumulasi penyusutan dan nilai buku aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 secara sistematis terlampir pada lampiran 1.

C.7 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp260.125.834

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp260.125.834 dan Rp131.232.874. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud Bawaslu D.I.Yogyakarta berupa software yang merupakan website. Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 42
Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021

Saldo Nilai per 31 Desember 2020	131.232.874
Mutasi Tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	98.990.000
Pembelian	29.902.960
Saldo per 31 Desember 2021	260.125.834
Akumulasi penyusutan	(176.197.167)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	83.928.667

Mutasi tambah berupa pengembangan nilai aset sebesar Rp98.990.000,00 diperoleh dari akun Belanja Modal Lainnya (536111) yang terdiri dari :

1. Pengembangan website Bawaslu Kota Yogyakarta sebesar Rp9.800.000,00 dengan alamat Url: <https://yogyakarta.bawaslu.go.id/>;
2. Pengembangan website Bawaslu Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp9.800.000,00 dengan alamat Url: <https://gunungkidul.bawaslu.go.id/>.

3. Pengembangan website Bawaslu Kabupaten Bantul sebesar Rp9.800.000,00 dengan alamat Url: <https://bantul.bawaslu.go.id/>.
4. Pengembangan website Bawaslu Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp9.790.000,00 dengan alamat Url: <https://kulonprogo.bawaslu.go.id/>.
5. Pengembangan website Bawaslu Kabupaten Sleman sebesar Rp9.800.000,00 dengan alamat Url: <https://sleman.bawaslu.go.id/>.
6. Pengembangan website Bawaslu D.I.Yogyakarta sebesar Rp50.000.000,00 dengan alamat Url: www.yogyakarta.bawaslu.go.id.

Adapun pembelian software komputer sebagai berikut:

1. belanja Software Komputer berupa aplikasi pembelajaran terpadu Bawaslu: SiJuwara senilai Rp23.202.960,00 pada tanggal 30 September 2021 dengan alamat Url: <https://sijuwara.yogyakarta.bawaslu.go.id/>;
2. Aplikasi SAMAWA merupakan aplikasi manajemen asset BMN Bawaslu DIY senilai Rp3.350.000 pada tanggal 10 Desember 2021 dengan alamat Url: samawa-diy.online.com ;
3. Aplikasi E-SPP merupakan aplikasi pengumpulan SPP senilai Rp3.350.000 pada tanggal 10 Desember 2021 dengan alamat Url: <https://e-spp.blankonstudio.com/> .

Aset Lain-
Lain
Rp450.445.25
0

C.8 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp450.445.250 dan Rp128.878.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas dirinci sebagai berikut:

Tabel 43
Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021

Nama Barang	Jumlah (unit)	Nilai
Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	1.944.000
White Board	1	797.000
Alat Penghancur Kertas	2	2.250.000
Mesin Absensi	1	7.997.000
Meja Kerja Kayu	6	13.890.600
Kursi Besi/Metal	5	7.025.250
Lemari Es	2	3.300.000
A.C. Split	2	11.555.000
Wireless	1	8.002.500
Camera Digital	7	61.525.000
Pesawat Telephone	2	20.000.000
Facsimile	1	1.590.000
P.C Unit	6	65.700.000
Lap Top	17	130.564.500
Note Book	1	10.000.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	40.380.400
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	63.924.000
Jumlah	72	450.445.250

Adapun mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

Tabel 44
Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021

Saldo per 31 Desember 2020	128.878.000
Mutasi Tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya	482.810.250
Mutasi Kurang:	-
Penghapusan	(161.243.000)
Saldo per 31 Desember 2021	450.445.250
Akumulasi penyusutan	(422.241.295)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	28.203.955

Mutasi tambah Aset Lain-Lain berupa Reklasifikasi Dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya terdiri dari:

1. Mutasi tambah atas penghentian BMN dikarenakan rusak berat berupa camera digital senilai Rp8.375.000,00 dan penghentian BMN dikarenakan rusak berat berupa laptop senilai Rp23.990.000. Surat penghentian aset ditetapkan berdasarkan surat keterangan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu D.I. Yogyakarta nomor 033.A/PL.08/YO/01/2021 tanggal 15 Januari 2021 dan sudah dilaksanakan lelang melalui KPKNL dengan risalah lelang nomor 248/42/2021 tanggal 16 Juni 2021. Aset tersebut sudah dilakukan penghapusan sesuai SK Nomor: 0244/PL.08/SJ/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021;
2. Mutasi tambah atas penghentian BMN dikarenakan rusak berat sesuai dengan surat keterangan Nomor:161/PL.08/YO/09/2021 tanggal 22 September 2021 terhadap BMN sejumlah 54 buah senilai Rp351.426.850 dengan rincian berikut ini:

Tabel 45
Rincian Penghentian BMN Karena Rusak Berat sesuai Surat Keterangan Nomor: 161/PL.08/YO/09/2021

Keterangan	Jumlah	Nilai
White Board	1	797.000
Alat Penghancur Kertas	1	1.125.000
Mesin Absensi	1	7.997.000
Meja Kerja Kayu	5	12.410.600
Kursi Besi/Metal	5	7.025.250
Lemari Es	2	3.300.000
A.C. Split	2	11.555.000
Wireless	1	8.002.500
Camera Digital	6	52.025.000
Pesawat Telephone	1	18.000.000
Facsimile	1	1.590.000
P.C Unit	3	39.900.000
Lap Top	14	105.349.500

Keterangan	Jumlah	Nilai
Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	23.600.000
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	58.750.000
Jumlah Total	54	351.426.850

3. Mutasi tambah atas penghentian BMN dikarenakan rusak berat sesuai dengan surat keterangan Nomor:174/PL.08/YO/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 terhadap BMN sejumlah 18 buah senilai Rp99.018.400 dengan rincian berikut ini:

Tabel 46

Rincian Penghentian BMN karena Rusak Berat sesuai Surat Keterangan Nomor: 174/PL.08/YO/10/2021

Keterangan	Jumlah	Nilai
Mesin Ketik Elektronik/Selektik	1	1.944.000
Alat Penghancur Kertas	1	1.125.000
Meja Kerja Kayu	1	1.480.000
Camera Digital	1	9.500.000
Pesawat Telephone	1	2.000.000
P.C Unit	3	25.800.000
Lap Top	3	25.215.000
Note Book	1	10.000.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	16.780.400
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	5.174.000
Jumlah Total	18	99.018.400

Mutasi kurang Aset Lain-Lain berupa penghapusan BMN kondisi rusak berat sejumlah 44 buah senilai Rp161.243.000 sesuai SK Penghapusan Nomor: 0244/PL.08/SJ/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021 perihal Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta. Adapun BMN yang dilakukan penghapusan adalah sebagai berikut:

Tabel 47

Rincian Penghapusan BMN TA 2021

Keterangan	Jumlah	Nilai
White Board	4	8.580.000
Kursi Besi/Metal	10	4.900.000
Televisi	1	3.495.000
Sound System	1	6.400.000
Voice Recorder	1	1.000.000
Camera Digital	1	8.375.000
Telepon Lapangan	7	22.050.000
P.C Unit	3	27.655.000
Lap Top	6	49.460.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	5.738.000
External/ Portable Hardisk	2	1.900.000
Server	1	6.980.000

Keterangan	Jumlah	Nilai
Hub	1	1.485.000
Kabel UTP	1	2.035.000
Acces Point	1	1.320.000
Peralatan Jaringan Lainnya	1	495.000
Instalasi Lain-lain	1	9.375.000
Jumlah Total	44	161.243.000

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp598.438.462

C.9 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp598.438.462 dan Rp215.183.244. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud (ATB) yang mencakup penurunan kapasitas satu masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh dan atau dibeli oleh satker.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Aset Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Tabel 48
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	31-Des-21	31-Des-20
Aset Tidak Berwujud	176.197.167	88.847.744
Aset Lain-lain	422.241.295	126.335.500
Jumlah	598.438.462	215.183.244

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud periode yang berakhir 31 Desember 2021 senilai Rp176.197.167 dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel 49
Saldo Amortisasi Software Per 31 Desember 2021*

Uraian	Nilai
Software Komputer	176.197.167
Jumlah	176.197.167

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain periode yang berakhir 31 Desember 2021 senilai Rp422.241.295 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 50
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Per 31 Desember 2021

Uraian	Nilai
Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1.944.000
White Board	797.000
Alat Penghancur Kertas	2.025.000
Mesin Absensi	7.997.000
Meja Kerja Kayu	11.589.420
Kursi Besi/Metal	6.868.725
Lemari Es	3.300.000
A.C. Split	11.555.000
Wireless	8.002.500
Camera Digital	55.825.000
Pesawat Telephone	19.800.000
Facsimile	1.590.000
P.C Unit	65.700.000
Lap Top	110.943.250
Note Book	10.000.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	40.380.400
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	63.924.000
Jumlah	422.241.295

C.10 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Rp25.516.516

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp25.516.516 dan Rp25.679.912. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 51
Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Akun	31-Des-21	31-Des-20
Listrik	522111	8.537.308	9.057.501
Telepon	522112	329.409	2.000.111
Internet	521111	10.179.412	9.016.800
Air	522113	50.000	150.500
Perjalanan dinas	524111	-	1.350.000
Belanja bahan	521211	-	3.880.000
Belanja keperluan perkantoran	521111	-	225.000
Gaji Pokok CPNS	511111	3.095.280	-
Tunj Suami/Istri CPNS	511121	154.764	-
Tunj Anak CPNS	511122	30.954	-
Pembulatan Gaji CPNS	511119	189	-
Tunjangan Kinerja CPNS	512411	3.139.200	-
Jumlah	Jumlah	25.516.516	25.679.912

C.11 Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp5.754.180 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Jangka Pendek Lainnya pada Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 52
Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021

No	Uraian	PPh Pasal 22	PPh Pasal 23	PPh Pasal 4 (2)	total
1	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum di Setor untuk Transaksi UP Nomor Kuitansi 000014 Untuk :Biaya sewa rumah pejabat eselon II Bawaslu DIY selama 1 tahun (Januari-Desember 2021)	-	-	4.300.000	4.300.000
2	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum di Setor untuk Transaksi UP Nomor Kuitansi 000126 Untuk :Pembuatan kalender tahun 2021 kantor Bawaslu DIY	-	200.000	-	200.000
3	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum di Setor untuk Transaksi UP Nomor Kuitansi 000493 Untuk :Pembelian ban luar Turanza kantor Bawaslu DIY	78.545	-	-	78.545
4	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum di Setor untuk Transaksi UP Nomor Kuitansi 000555 Untuk :Pembelian HD Ext WD My Cloud Ex2 Ultra untuk kantor Bawaslu DIY	113.863	-	-	113.863
5	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum di Setor untuk Transaksi UP Nomor Kuitansi 000727 Untuk :Pembelian AC 2 unit (1 PK dan 1.5 PK) untuk kantor Bawaslu DIY	132.954	-	-	132.954
6	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum di Setor untuk Transaksi UP Nomor Kuitansi 000851 Untuk :Pembelian AC 2 unit (1 PK dan 2 PK) untuk kantor Bawaslu DIY (Bawaslu Kulon Progo)	177.750	-	-	177.750
7	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum di Setor untuk Transaksi UP Nomor Kuitansi 001054 Untuk :Pembelian lensa kamera untuk kantor Bawaslu 2021, yaitu kekurangan PPh yang telah dibayarkan oleh rekanan	284.250	-	-	284.250
8	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum di Setor untuk Transaksi UP Nomor Kuitansi 001098 Untuk :Pembelian AC 2 Unit untuk Kantor Bawaslu DIY	142.500	-	-	142.500
9	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum di Setor untuk Transaksi UP Nomor Kuitansi 001097 Untuk :Pembelian AC 2 Unit untuk Kantor Bawaslu DIY	142.500	-	-	142.500
10	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum di Setor untuk Transaksi UP Nomor Kuitansi 001819 Untuk :Pembayaran pencetakan buku kinerja pengawasan pemilihan 2020 Bawaslu DIY	-	181.818	-	181.818
	TOTAL	1.072.362	381.818	4.300.000	5.754.180

Ekuitas
Rp2.165.831.
360

C.12 Ekuitas

Ekuitas periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.165.831.360 dan Rp5.843.391.584. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset sebesar Rp2.191.347.876 dan kewajiban sebesar Rp25.516.516. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan, Rp0

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 atau Nihil. Terdapat perbedaan antara saldo Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran. Adapun mutasi Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 53
Mutasi Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2021

Saldo per 31 Desember 2020	0
Mutasi Tambah	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.000.001
Jumlah Mutasi Tambah	6.000.001
Mutasi Kurang:	
Penyetoran PNBPN ke Kas Negara	6.000.0001
Jumlah Mutasi Kurang	6.000.0001
Jumlah Pendapatan per 31 Desember 2021	0

Mutasi tambah Penerimaan Negara Bukan Pajak per 30 Desember 2021 sebesar Rp6.000.001 merupakan PNBPN Bawaslu D.I. Yogyakarta yang diperoleh dari Pendapatan penjualan peralatan dan mesin melalui mekanisme lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta dengan Risalah Lelang nomor 248/42/2021 tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya hasil lelang telah dilakukan Penyetoran PNBPN ke Kas Negara dengan nomor NTPN 71F8B3CIEOCDV03P tanggal 18 Juni 2021 senilai Rp6.000.001 sehingga Jumlah Pendapatan per 31 Desember 2021 adalah Rp0.

Beban Pegawai
Rp6.151.454.543

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp6.151.454.543 dan Rp5.499.802.573. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 54
Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	680.318.040	471.810.340	44,19
Beban Pembulatan Gaji PNS	12.422	7.862	58,00
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	35.486.302	16.705.622	112,42
Beban Tunjangan Anak PNS	9.723.346	4.502.252	115,97
Beban Tunjangan Struktural PNS	93.029.800	64.531.400	44,16
Beban Tunjangan Fungsional PNS	25.860.000	-	100,00
Beban Tunjangan PPh PNS	60.724.066	38.274.475	58,65
Beban Tunjangan Beras PNS	35.847.900	19.408.560	84,70
Beban Uang Makan PNS	180.005.400	185.471.000	(2,95)
Beban Tunjangan Umum PNS	25.215.000	19.285.000	30,75
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	4.013.459.600	4.009.354.100	0,10
Beban Uang Lembur	193.730.000	91.505.000	111,72
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	798.042.667	578.946.962	37,84
Jumlah	6.151.454.543	5.499.802.573	11,85

Beban pegawai per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 11,85% dibandingkan pada periode yang sama tahun anggaran 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pembahasan pegawai CPNS Organik Bawaslu TA 2020 sebanyak 6 orang TMT 1 Desember 2020 dengan alokasi jabatan sebagai: Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Analis BMN, Analis Materi Sidang, Analis Perencanaan Anggaran, Analis Hubungan Antar Lembaga, Analis Hukum dan mulai dibayarkan gaji dari Bawaslu D.I.Yogyakarta bulan Oktober 2021;
2. Adanya perubahan status pegawai yang menikah dan mempunyai anak sehingga menambah belanja tunjangan suami/istri PNS dan tunjangan anak PNS;
3. Pembayaran kenaikan gaji sehubungan dengan dilantiknya beberapa Staf PNS Bawaslu D.I. Yogyakarta menjadi pejabat fungsional pada bulan April 2021;
4. Adanya kenaikan pangkat PNS dari golongan IIIb ke IIIc dan dari golongan IVb ke IVc di bulan Oktober 2021.

Terdapat perbedaan antara saldo Beban Pegawai pada Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran. Adapun mutasi Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 55
Mutasi Beban Pegawai per 31 Desember 2021

Saldo per 31 Desember 2021	6.145.034.156
Mutasi Tambah	
Belanja Pegawai yang masih Harus Dibayar	6.420.387
Jumlah Mutasi Tambah	6.420.387
Mutasi Kurang:	
Jumlah Mutasi Kurang	0
Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2021	6.151.454.543

Mutasi tambah Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp6.420.387 merupakan Belanja Pegawai CPNS bulan Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 56
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2021

Akun	Keterangan	Nilai
511111	Kekurangan Gaji Pokok CPNS bulan Desember 2021	3.095.280
511119	Kekurangan Pembulatan gaji CPNS bulan Desember 2021	189
511121	Kekurangan Tunj. Suami/Istri CPNS bulan Desember 2021	154.764
511122	Kekurangan Tunj. Anak CPNS bulan Desember 2021	30.954
512411	Kekurangan Tunjangan Kinerja CPNS bulan Desember 2021	3.139.200
Total		6.420.387

Beban Persediaan
Rp15.519.535

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp15.519.535 dan Rp812.459.454 atau mengalami penurunan sebesar 98,09%. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian beban persediaan adalah sebagai berikut:

Tabel 57
Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	15.519.535	812.459.454	(98,09)
Jumlah	15.519.535	812.459.454	(98,09)

Penurunan Beban Persediaan Konsumsi dikarenakan pada TA 2020 sebagian besar persediaan merupakan Alat Pelindung Diri (APD) yang berasal dari hibah untuk mendukung pelaksanaan pengawasan pada masa tahapan Pilkada Serentak 2020 sehingga dengan berakhirnya masa tahapan tersebut pada TA 2021 persediaan hanya

untuk memenuhi keperluan operasional perkantoran. Mutasi Beban Persediaan adalah sebagai berikut:

Tabel 58
Mutasi Beban Persediaan TA 2021

Mutasi Tambah:	
Saldo Awal	1.610.135
Realisasi Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	13.909.400
Jumlah Mutasi Tambah	15.519.535
Mutasi Kurang:	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-
Sisa persediaan per 31 Desember 2021	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2021	15.519.535

Mutasi tambah Beban Persediaan berupa Realisasi Belanja Barang Persediaan senilai Rp13.909.400 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 59
Realisasi Belanja Barang Persediaan TA 2021

TGL. BUKU	KODE BARANG	NAMA BARANG	TOTAL
10-03-2021	1010314001000004	Handsantizer	165.000
25-03-2021	1010314001000004	Handsantizer II	107.000
21-10-2021	1010301001000001	pulpen	521.500
21-10-2021	1010301001000002	Pensil	60.000
21-10-2021	1010301006000001	Ordner	840.000
21-10-2021	1010301006000002	Stopmap	422.000
21-10-2021	1010301012000001	Staples	422.000
21-10-2021	1010301013000001	Isi Staples	210.000
21-10-2021	1010301999000001	Tipex	233.500
21-10-2021	1010301999000002	Binder Clip	1.130.000
21-10-2021	1010301999000003	Post It Sign Here	105.000
21-10-2021	1010301999000004	Lem	75.000
21-10-2021	1010301999000005	Stamp Pad	37.500
21-10-2021	1010301999000006	Rautan	50.000
21-10-2021	1010301999000007	Tempat Pensil	126.000
21-10-2021	1010301999000008	Gunting	48.000
21-10-2021	1010301999000009	Calculator	140.000
21-10-2021	1010301999000010	Label	180.000
21-10-2021	1010301999000011	Lakban	432.000
21-10-2021	1010302001000001	Kertas	1.730.000
21-10-2021	1010302004000001	Amplop	350.000
21-10-2021	1010304004000001	Tinta Printer	1.325.000
21-10-2021	1010304006000001	Flashdisk	2.290.000
21-10-2021	1010304006000002	USB	195.000
21-10-2021	1010304008000001	CD	90.000
21-10-2021	1010304010000001	Mouse	720.000

TGL. BUKU	KODE BARANG	NAMA BARANG	TOTAL
09-11-2021	1010314001000004	Handsanitizer	562.500
02-12-2021	1010314001000004	Handsanitizer	1.342.400
Jumlah			13.909.400

Persediaan senilai Rp13.909.400 sudah habis terpakai per 31 Desember 2021 berdasarkan BA Cek Fisik Persediaan Nomor: 005.A/PL.07/YO/01/2022 tanggal 3 Januari 2022 nilainya Rp0.

Beban Barang
dan Jasa
Rp5.905.804.416

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp5.905.804.416 dan Rp24.393.159.599 mengalami penurunan sebesar 75,79%. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi Beban modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 60
Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	3.801.195.020	13.468.876.669	(71,78)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.528.600	3.470.000	59,33
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	271.946.500	380.520.000	(28,53)
Beban Barang Operasional Lainnya	92.122.570	740.166.600	(87,55)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	171.822.532	679.170.350	(74,70)
Beban Bahan	722.856.575	2.887.296.699	(74,96)
Beban Honor Output Kegiatan	39.520.000	1.819.470.000	(97,83)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	421.432.520	(100,00)
Beban Langganan Listrik	135.325.973	156.938.762	(13,77)
Beban Langganan Telepon	2.776.446	21.746.014	(87,23)
Beban Langganan Air	727.000	1.414.000	(48,59)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5.644.200	157.456.795	(96,42)
Beban Jasa Konsultan	-	15.000.000	(100,00)
Beban Sewa	418.960.000	2.173.747.350	(80,73)
Beban Jasa Profesi	45.900.000	82.400.000	(44,30)
Beban Jasa Lainnya	134.325.000	279.832.400	(52,00)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	56.789.000	1.104.221.440	(94,86)
Beban Aset Ekstrakompatabel Peralatan dan Mesin	365.000	-	100,00
Jumlah Belanja Kotor	5.905.804.416	24.393.159.599	(75,79)

Beban barang dan jasa per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 75.79% dibandingkan pada periode yang sama tahun anggaran 2020. Hal ini disebabkan

karena adanya kebijakan APBN TA 2021 sebagaimana arahan Presiden RI dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui penghematan belanja, sehingga pagu anggaran Bawaslu D.I.Yogyakarta untuk Belanja Barang dan Jasa TA 2021 relatif sedikit. Selain itu penurunan ini terjadi karena telah berakhirnya tahapan Pilkada Serentak 2020 sehingga terjadi penurunan dalam belanja honor output kegiatan dan beban sewa. Terdapat perbedaan jumlah realisasi Beban Barang Jasa dibandingkan jumlah Beban Barang Jasa per 31 Desember 2021, hasil mutasi Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

*Tabel 61
Mutasi Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021*

Mutasi Tambah:	
Belanja Barang Operasional	4.342.293.085
Belanja Barang Non Operasional	766.621.575
Belanja Jasa	785.623.539
Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2021	19.096.129
Jurnal Balik Sewa di bayar dimuka TAYL	16.500.000
Belanja aset ekstrakomptabel dari Pembelian belanja bahan	365.000
Jumlah Mutasi Tambah	5.930.499.328
Mutasi Kurang:	
Pembayaran Belanja barang dan jasa TAYL	24.329.912
Beban aset ekstrakomptabel dari Pembelian belanja bahan	365.000
Jumlah Mutasi Kurang	24.694.912
Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021	5.905.804.416

Mutasi tambah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 senilai Rp5.930.499.328 dengan rincian:

1. Belanja Barang Operasional merupakan pembayaran belanja keperluan perkantoran, belanja pengiriman surat dinas pos pusat, belanja honor operasional satuan kerja, belanja barang operasional lainnya dan belanja barang operasional – penanganan Pandemi COVID-19 di lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta sampai dengan bulan Desember 2021;
2. Belanja Barang Non Operasional merupakan pembayaran belanja bahan dan belanja honor output kegiatan sampai dengan bulan Desember 2021;
3. Belanja Barang Persediaan merupakan pembayaran belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja persediaan penanganan Pandemi COVID-19 di lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta sampai dengan bulan Desember 2021;
4. Belanja Jasa merupakan pembayaran belanja langganan langganan listrik, belanja langganan telepon, belanja langganan air, belanja daya dan jasa lainnya,

belanja langganan sewa, belanja langganan profesi dan belanja jasa lainnya serta belanja jasa-penanganan pandemi COVID-19 di lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta sampai dengan bulan Desember 2021;

5. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2021 senilai Rp19.096.129 dengan rincian:

Tabel 62

Belanja Barang yang Masih Harus dibayar per 31 Desember 2021

Akun	Keterangan	Jumlah
522111	Beban Langganan Listrik	8.537.308
522112	Beban Langganan Telepon	329.409
522113	Beban Langganan Air	50.000
521111	Belanja keperluan perkantoran	10.179.412
Jumlah Total		19.096.129

6. Jurnal balik Sewa dibayar dimuka TAYL per 31 Desember 2021 senilai Rp16.500.000 merupakan belanja sewa rumah dinas untuk pejabat eselon III nomor kontrak P.183/YO/SET/RT/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 senilai Rp9.000.000 dan belanja sewa rumah dinas pejabat eselon IV nomor dokumen sewa 846 tanggal 1 Juni 2020 senilai Rp7.500.000;
7. Belanja aset ekstrakomptabel senilai Rp365.000 merupakan belanja peralatan dan mesin berupa Focusing Screen/Layar LCD Projector sejumlah 1 buah.

Mutasi kurang Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 senilai Rp24.329.912 dengan rincian:

1. Pembayaran Belanja barang dan jasa TAYL dengan rincian:

Tabel 63

Pembayaran Belanja barang dan jasa TAYL

Akun	Keterangan	Jumlah
521111	Beban Keperluan Perkantoran	9.857.275
521211	Beban Bahan	3.880.000
522111	Beban Langganan Listrik	9.057.501
522113	Beban Langganan Air	150.500
522112	Beban Langganan Telepon	1.384.636
Jumlah Total		24.329.912

Belanja aset ekstrakomptabel senilai Rp365.000 merupakan belanja peralatan dan mesin berupa Focusing Screen/Layar LCD Projector sejumlah 1 buah.

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp749.906.130 dan Rp1.061.657.142. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan pada beban pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar 29,36% dikarenakan adanya pembatasan pagu belanja dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan refocusing dan realokasi belanja K/L TA 2021. Selain itu telah dilaksanakannya renovasi gedung/bangunan pada tahun sebelumnya sehingga tidak banyak dilakukan alokasi untuk biaya pemeliharaan pada tahun berjalan. Penurunan beban pemeliharaan peralatan dan mesin dikarenakan penurunan intensitas perjalanan dinas akibat pembatasan Kegiatan Masyarakat sehingga berdampak terhadap penurunan biaya pemeliharaan peralatan dan mesin khususnya kendaraan. Selain itu karena terdapat pengurangan kendaraan operasional Bawaslu Kabupaten/Kota dibandingkan dengan tahun lalu dari 26 unit menjadi 5 unit. Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 64
Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	263.654.588	388.352.699	(32,11)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	486.251.542	673.304.443	(27,78)
Jumlah	749.906.130	1.061.657.142	(29,36)

Tidak terdapat perbedaan antara saldo Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp2.631.954.492 dan Rp4.004.837.503. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 65

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1.945.594.492	1.789.172.503	8,74
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	233.300.000	968.605.000	(75,91)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	324.090.000	1.167.705.000	(72,25)
Beban Perjalanan Dinas- Penanganan Pandemi Covid-19	-	21.875.000	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	128.970.000	57.480.000	124,37
Jumlah Beban Kotor	2.631.954.492	4.004.837.503	(34,28)

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 34,28% dikarenakan telah berakhirnya tahapan Pilkada Serentak tahun 2020 sehingga besaran pagu belanja pada TA 2021 lebih kecil dibandingkan TA 2020. Selain itu dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam rangka pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran COVID-19 banyak kegiatan yang dilakukan secara daring sehingga kegiatan perjalanan dinas juga dibatasi.

Tabel 66

Mutasi Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 2020

Mutasi Tambah:	
Belanja Perjalanan Dinas	1.946.944.492
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	233.300.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	324.090.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	128.970.000
Jumlah Mutasi Tambah	2.633.304.492
Mutasi Kurang:	
Jurnal balik belanja perjalanan dinas biasa TAYL	1.350.000
Jumlah Mutasi Kurang	1.350.000
Jumlah Beban Perjalanan dinas per 31 Desember 2021	2.631.954.492

Jurnal balik belanja perjalanan dinas biasa TAYL senilai Rp1.350.000 merupakan beban perjalanan biasa Bawaslu Kabupaten Sleman dari dana hibah tahun 2020.

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp1.210.435.584 dan Rp1.373.029.904 atau mengalami penurunan sebesar 11,84%. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 67

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan mesin	1.101.413.076	1.319.225.019	(16,51)
Beban Amortisasi Software	87.349.423	51.162.385	70,73
Beban Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	21.673.085	2.642.500	720,17
Jumlah	1.210.435.584	1.373.029.904	(11,84)

Tabel 68

Perhitungan beban penyusutan amortisasi dengan akumulasi penyusutan

	Perhitungan Beban Penyusutan Amortisasi Dengan Akumulasi Penyusutan	
a	Saldo Akumulasi Penyusutan dan amortisasi 31 Des 2020	5.752.399.637
b	Beban Penyusutan dan amortisasi 31 Desember 2021	1.210.435.584
C= a+b	Saldo Akumulasi Penyusutan dan amortisasi 31 Desember 2021 Menurut Perhitungan	6.962.835.221
d	Saldo Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021 Menurut Neraca	6.818.612.221
E=c-d	Selisih	144.223.000

Beban penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2021 keseluruhan berasal dari Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran. Terdapat perbedaan beban penyusutan amortisasi pada laporan operasional sebesar Rp144.223.000 dibandingkan dengan selisih akumulasi penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 pada Neraca karena terjadi penghapusan peralatan dan mesin sehingga penyusutannya berkurang. Adapun Rinciannya adalah sebagai berikut ini:

Tabel 69

Selisih beban penyusutan amortisasi dengan akumulasi penyusutan

Keterangan	Jumlah
Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	(1.944.000)
White Board	(797.000)
Alat Penghancur Kertas	(1.800.000)
Mesin Absensi	(7.997.000)
Meja Kerja Kayu	(10.200.360)
Kursi Besi/Metal	(6.712.200)
Lemari Es	(3.300.000)

Keterangan	Jumlah
A.C. Split	(11.555.000)
Wireless	(8.002.500)
Camera Digital	(52.637.500)
Pesawat Telephone	(19.600.000)
Facsimile	(1.590.000)
P.C Unit	(65.700.000)
Lap Top	(112.315.750)
Note Book	(10.000.000)
Printer (Peralatan Personal Komputer)	(40.380.400)
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	(63.924.000)
Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1.944.000
White Board	(7.783.000)
Alat Penghancur Kertas	1.800.000
Mesin Absensi	7.997.000
Meja Kerja Kayu	10.200.360
Kursi Besi/Metal	1.812.200
Lemari Es	3.300.000
A.C. Split	11.555.000
Televisi	(3.495.000)
Sound System	(6.400.000)
Wireless	8.002.500
Voice Recorder	(1.000.000)
Camera Digital	49.287.500
Pesawat Telephone	19.600.000
Facsimile	1.590.000
Telepon Lapangan	(22.050.000)
P.C Unit	38.045.000
Lap Top	74.850.750
Note Book	10.000.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	34.642.400
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	63.924.000
External/ Portable Hardisk	(1.900.000)
Server	(6.980.000)
Hub	(1.485.000)
Kabel UTP	(2.035.000)
Acces Point	(1.320.000)
Peralatan Jaringan Lainnya	(495.000)
Instalasi Lain-lain	(9.375.000)
Jumlah Total	(144.223.000)

Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp626.179.718

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan Non Operasional periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan

2020 masing-masing adalah sebesar Rp626.179.718 dan Rp111.174.391 atau mengalami kenaikan sebesar 463,24%. Rincian Kegiatan Non Operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 70
Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Naik (Turun) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	6.000.001	789.555	659,92
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	4.475.300	(100,00)
Jumlah Pendapatan	6.000.001	5.264.855	13,96
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	632.179.719	-	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		116.439.246	(100,00)
Jumlah Beban	632.179.719	116.439.246	442,93
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	(626.179.718)	(111.174.391)	463,24

Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2020 sebesar Rp626.179.718 dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp6.000.001,00, merupakan PNPB Bawaslu D.I. Yogyakarta yang diperoleh dari Pendapatan penjualan peralatan dan mesin melalui mekanisme lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta dengan Risalah Lelang nomor 248/42/2021 tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya hasil lelang telah disetorkan ke kas negara dengan nomor NTPN 71F8B3CIEOCDV03P tanggal 18 Juni 2021 senilai Rp6.000.001.
2. Beban dari kegiatan non lancar sebesar Rp632.179.719 merupakan hasil dari:
 - a. Hibah BMN berupa ATR Bawaslu DIY kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, BAST Nomor 060/PL.04/YO/03/2021 dan Nomor 028/727 tanggal 1 Maret 2021 senilai Rp119.000.000;
 - b. Hibah BMN berupa ATR Bawaslu DIY kepada Pemerintah Daerah DIY, BAST Nomor P.064.B/PL.04/YO/03/2021 dan Nomor 1/BA/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 senilai Rp277.824.905;
 - c. Hibah BMN berupa ATR Bawaslu DIY kepada Pemerintah Daerah DIY, BAST Nomor 090.B/PL.04/YO/04/2021 dan Nomor 3/BA/IV/2021 tanggal 16 April 2021 senilai Rp218.334.814;
 - d. Penjualan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan senilai Rp161.243.000 dan telah dilaksanakan penghapusan sesuai SK Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Nomor: 0244/PL.08/SJ/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021;
 - e. Beban penyusutan atas pelepasan aset yang telah dilakukan penghapusan senilai Rp144.223.000.

Pos Luar Biasa
Rp0

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 atau nihil.

Defisit LO
Rp17.291.254.418

D.10 Surplus/Defisit LO

Defisit LO per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp17.291.254.418 dan Rp37.256.120.566.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Kementerian/Lembaga adalah kekayaan bersih Kementerian/Lembaga yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban kementerian pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Ekuitas Awal
Rp5.843.391.584

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.843.391.584 dan Rp6.921.224.206

Defisit LO
Rp17.291.254.418

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp17.291.254.418 dan Rp37.256.120.566 Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Yang
Menambah/Mengurangi
Ekuitas
Rp1.143.065.397

E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.143.065.397 dan Rp0. Koreksi berupa koreksi lain-lain yang merupakan pengesahan pengembalian sisa hibah langsung bentuk uang (SP4HL) atas dana hibah yang digunakan dalam pengawasan tahapan Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020. Rincian pengembalian sisa hibah langsung bentuk uang (SP4HL) per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 71

Rincian Pengesahan Pengembalian Sisa Hibah per 31 Desember 2021

No	Penerima Hibah	Nomor Register	Bentuk	Pendonor	SP4HL	SP3HL
1	2	3	4	5	6	7
1	Bawaslu Kab. Bantul	2JWF8G8A	UANG	Pemda Kab. Bantul	357.737.782	210300501500002
2	Bawaslu kab. Sleman	2DGBJJ8A	UANG	Pemda Kab. Sleman	664.304.715	210300501480002
3	Bawaslu Kab. Gunungkidul	2EVSTKYA	UANG	Pemda Kab. Gunungkidul	121.022.900	210300501490002
Jumlah					1.143.065.397	

Transaksi Antar
Entitas
Rp14.756.759.591

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp14.756.759.591 dan Rp36.178.287.944. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 72
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2021 dan 2020

Transaksi Antar Entitas	31-Des-21	31-Des-20
Ditagihkan Ke Entitas Lain	14.762.759.592	16.638.998.524
Diterima dari Entitas Lain	(6.000.001)	(2.974.555)
Pengesahan Hibah Langsung	-	19.542.263.975
Jumlah Belanja	14.756.759.591	36.178.287.944

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar Rp6.000.001 merupakan pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 73
Diterima dari Entitas Lain (DDEL) per 31 Desember 2021

Diterima Dari Entitas Lain	Jumlah
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	6.000.001
Total	6.000.001

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.000.001 merupakan PNBPN Bawaslu D.I. Yogyakarta yang diperoleh dari Pendapatan penjualan peralatan dan mesin melalui mekanisme lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta dengan Risalah Lelang nomor 248/42/2021 tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya hasil lelang telah disetorkan ke kas negara dengan nomor NTPN 71F8B3CIEOCDV03P tanggal 18 Juni 2021 senilai Rp6.000.001.

Sedangkan DKEL sebesar Rp14.762.759.592 merupakan belanja netto yang berasal dari anggaran rupiah murni, terdiri dari:

Tabel 74
Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) per 31 Desember 2021

Ditagihkan ke Entitas Lain	Jumlah
Belanja Pegawai	6.145.034.156
Belanja Barang	8.189.632.763
Belanja Modal	428.092.673
Total	14.762.759.592

E.4.2 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.102.025.458. SP2HL sebesar Rp1.102.025.458 merupakan pengesahan pendapatan hibah uang yang diberikan oleh Pemda Kabupaten Bantul, Sleman dan Gunungkidul kepada Bawaslu Kabupaten Bantul, Sleman dan Gunungkidul. Rincian pengesahan hibah adalah sebagai berikut:

*Tabel 75
Rincian Pengesahan Hibah per 31 Desember 2021*

No	Penerima Hibah	Nomor Register	Bentuk	Pendonor	SP2HL	SPHL
1	Bawaslu Kab. Bantul	2JWF8G8A	UANG	Pemda Kab. Bantul	420.000.000	210300501500001
2	Bawaslu Kab. Sleman	2DGBJJ8A	UANG	Pemda Kab. Sleman	309.333.330	210300501480001
3	Bawaslu Kab. Gunungkidul	2EVSTKYA	UANG	Pemda Kab. Gunungkidul	372.692.128	210300501490001
Jumlah					1.102.025.458	

Pada bulan Juni 2021 telah dilaksanakan pengembalian sisa dana hibah ke kas Daerah dan telah disahkan ke KPPN dibuktikan dengan terbitnya SP3HL sehingga saldo Kas yang Berasal dari Hibah Langsung adalah sebesar Rp0. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

*Tabel 76
Rincian Pengesahan SP4HL dan SP3HL per 31 Desember 2021*

No	Penerima Hibah	Nomor Register	Bentuk	Pendonor	SP4HL	SP3HL
1	Bawaslu Kab. Bantul	2JWF8G8A	UANG	Pemda Kab. Bantul	357.737.782	210300501500002
2	Bawaslu kab. Sleman	2DGBJJ8A	UANG	Pemda Kab. Sleman	664.304.715	210300501480002
3	Bawaslu Kab. Gunungkidul	2EVSTKYA	UANG	Pemda Kab. Gunungkidul	121.022.900	210300501490002
Jumlah					1.143.065.397	

*Tabel 77
Rincian Saldo Hibah per 31 Desember 2021*

Penerima Hibah	Nomor Register	Saldo Awal Tahun 2021	SP2HL Tahun 2021	Jumlah Realisasi Tahun 2021	SP4HL tahun 2021	Saldo 31 Desember 2021
Kabupaten Bantul	2JWF8G8A	777.737.782	420.000.000	420.000.000	357.737.782	-
Kabupaten Sleman	2DGBJJ8A	973.638.045	309.333.330	309.333.330	664.304.715	-
Kabupaten Gunung Kidul	2EVSTKYA	493.715.028	372.692.128	372.692.128	121.022.900	-
JUMLAH		2.245.090.855	1.102.025.458	1.102.025.458	1.143.065.397	-

Kenaikan /Penurunan
Ekuitas
Rp3.677.560.224

E.5 Kenaikan dan Penurunan Ekuitas

Penurunan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp3.677.560.224 dan Rp1.077.832.622.

Tabel 78
Penurunan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Kenaikan/Penurunan Ekuitas	31-Des-21	31-Des-20
Surplus/Defisit LO	(17.291.254.418)	(37.256.120.566)
Koreksi yang Mengurangi Ekuitas	(1.143.065.397)	-
Transaksi Antar Entitas	14.756.759.591	36.178.287.944
Total	(3.677.560.224)	(1.077.832.622)

Ekuitas Akhir
Rp2.165.831.360

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir periode yang berakhir pada pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.165.831.360 dan Rp5.843.391.584. Nilai ekuitas akhir merupakan akumulasi nilai ekuitas awal sebesar Rp5.843.391.584 dikurangi penurunan ekuitas sebesar Rp3.677.560.224.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Pengungkapan Pengembangan Organisasi

Pada tahun anggaran 2021 terbit Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan menggantikan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, yang berlaku terhitung mulai tanggal 08 April 2021. Dalam SOTK yang baru Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat;
- c. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

F.2 Pemotongan Anggaran

Sesuai Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0171/SJ/PR.03.01/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 perihal penghematan belanja K/L TA 2021, telah dilaksanakan pemotongan anggaran dalam rangka pemenuhan vaksin nasional sebagai bentuk dukungan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar 0.9% yakni dari anggaran semula Rp15.870.205.000 menjadi Rp15.751.985.000.

Telah dilakukan pemotongan anggaran dalam rangka Refocusing dan alokasi belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV sesuai surat sekretaris jenderal Bawaslu Nomor 0282/PR.03.01/SJ/07/2021 tanggal 27 Juli 2021 sebesar 4,08% yakni dari anggaran semula Rp15.751.985.000 menjadi Rp15.108.795.000.

F.3 Pengungkapan Lain-Lain

a. Rekening Pemerintah

Berdasarkan surat KPPN tentang persetujuan pembukaan rekening pengeluaran dan rekening pengeluaran pembantu Sekretariat Bawaslu Provinsi DI.Yogyakarta (686332) memberikan persetujuan pembukaan rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bank BRI Yogyakarta untuk keperluan menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Bank	Nama rekening	Surat Izin KPPN	Nomor Rekening
Bawaslu DI Yogyakarta	BRI	BPG 030 BAWASLU DIY	S-2096/WPB.15/KP.01/2015	024501000993304
Bawaslu Kota Yogyakarta	BRI	BPP 030 BAWASLU PROV DIY KOTA	S-4599/WPB.15/KP.01/2017	024501001908302
Bawaslu Kab. Bantul	BRI	BPP 030 BAWASLU PROV DIY BTL	S-4597/WPB.15/KP.01/2017	023601001407307
Bawaslu Kab. Sleman	BRI	BPP 030 BAWASLU PROV DIY SLM	S-4598/WPB.15/KP.01/2017	024701001434301
Bawaslu Kab. Gunungkidul	BRI	BPP 030 BAWASLU PROV DIY GK	S-4596/WPB.15/KP.01/2017	015301001408309
Bawaslu Kab. Kulon Progo	BRI	BPP 030 BAWASLU PROV DIY KP	S-4595/WPB.15/KP.01/2017	015201000840300

Pada tahun 2019 Bawaslu D.I. Yogyakarta menerima Dana Hibah Pilkada 2020 untuk 3 (tiga) Kabupaten yaitu Bawaslu Kabupaten Bantul, Bawaslu Kabupaten Sleman dan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul. Untuk keperluan menampung dana hibah langsung tersebut telah terbit persetujuan pembukaan rekening penampungan Dana Hibah Langsung atas nama Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Bank	Nama rekening	Surat izin KPPN	Nomor Rekening	No Register
Hibah Bawaslu Kab. Bantul	BPD DIY	RPL 030 PDHL BAWASLU DIY UTK 2JWF8G8A	S-2982/WPB.15/KP.01.04/2019	04111001655	2JWF8G8A
Hibah Bawaslu Kab. Sleman	BRI	RPL 030 PDHL BAWASLU DIY UTK 2DGBJJ8A	S-2983/WPB.15/KP.01.04/2019	024701001612307	2DGBJJ8A
Hibah Bawaslu Kab. Gunungkidul	BRI	RPL 030 PDHL BAWASLU DIY UTK 2EVSTKYA	S-2984/WPB.15/KP.01.04/2019	015301001642301	2EVSTKYA

Dengan selesainya tahapan pengawasan Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020, telah diselesaikan penutupan rekening penampungan dana hibah langsung dengan rincian sebagai berikut:

- Rekening penampungan dana hibah Bawaslu Kabupaten Bantul dengan nama rekening RPL 030 PDHL Bawaslu DIY utk 2JWF8G8A dengan nomor rekening 04111001655 telah ditutup per 23 April 2021 berdasarkan Surat Keterangan Bank BPD DIY Cabang Bantul nomor 043/DJ 0602;
- Rekening penampungan dana hibah Bawaslu Kabupaten Sleman dengan nama rekening RPL 030 PDHL Bawaslu dengan nomor rekening 024701001612307 telah ditutup per 22 April 2021 berdasarkan Surat pemberitahuan penutupan Rekening Giro dari Bank BRI Kantor Cabang Sleman nomor 1099/KC-VII/OPS/04/2021 tanggal 23 April 2021;
- Rekening penampungan dana hibah Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dengan nama rekening RPL 030 PDHL Bawaslu utk 2EVSTKYA dengan nomor rekening 015301001642301 telah ditutup per 26 April 2021 berdasarkan Surat Keterangan Bank BRI Kantor Cabang Wonosari nomor 1745 KC-VII/OPS/04/2021 tanggal 26 April 2021.

Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga maka telah dilaksanakan migrasi rekening giro ke rekening virtual account. Adapun rekening virtual account yang digunakan berdasarkan surat Kementerian Keuangan nomor S-2551/WPB-12/KP.06/2020 sebagai berikut:

No	Pemilik Rekening	Nama Account	Nomor Account
1	Bawaslu D.I.Yogyakarta	BPG 030 BAWASLU DIY	652296863321000
2	Bawaslu Kota Yogyakarta	BPP 030 BAWASLU PROV DIY KOTA	652296863321001
3	Bawaslu Kabupaten Bantul	BPP 030 BAWASLU PROV DIY BTL	652296863321002
4	Bawaslu Kabupaten Sleman	BPP 030 BAWASLU PROV DIY SLM	652296863321003
5	Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	BPP 030 BAWASLU PROV DIY GK	652296863321004
6	Bawaslu Kabupaten Kulon Progo	BPP 030 BAWASLU PROV DIY KP	652296863321005

Selanjutnya telah dilakukan pemindahbukuan rekening virtual account BRI ke rekening virtual account BNI sesuai dengan surat Kementerian Keuangan nomor S-650/WPB.12/KP.06/2021 sebagai berikut:

No	Pemilik Rekening	Nama Account	Nomor Account
1	Bawaslu D.I.Yogyakarta	BPG 030 BAWASLU DIY	9890716863321000
2	Bawaslu Kota Yogyakarta	BPP 030 BAWASLU PROV DIY KOTA	9890716863321001
3	Bawaslu Kabupaten Bantul	BPP 030 BAWASLU PROV DIY BTL	9890716863321002
4	Bawaslu Kabupaten Sleman	BPP 030 BAWASLU PROV DIY SLM	9890716863321003
5	Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	BPP 030 BAWASLU PROV DIY GK	9890716863321004
6	Bawaslu Kabupaten Kulon Progo	BPP 030 BAWASLU PROV DIY KP	9890716863321005

b. Pejabat Perbendaharaan

- Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0530/K.Bawaslu/KU.01.00/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang menunjuk atas nama Drs. Screning Yosmar Dano, M.Si, Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta, sebagai Kuasa pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu D.I. Yogyakarta.
- Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Selaku Kuasa pengguna Anggaran dan Kuasa pengguna Barang Nomor P-001/KU.01.00/YO/01/2021 tanggal 4 Januari 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang, Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021, menunjuk Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Bawaslu D.I. Yogyakarta sebagai berikut:

Semula

Pejabat Pembuat Komitmen : Noeroel Fitriani, S.ST., M.E

Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Mutia Utami, S.Si.

Bendahara Pengeluaran : Rosita Hestiniingsih, A.Md

Menjadi

Pejabat Pembuat Komitmen : Noeroel Fitriani, S.ST., M.E

Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Mutia Utami, S.Si.
Bendahara Pengeluaran : Rosita Hestiningsih, A.Md

- Dikarenakan Ibu Noeroel Fitriani, S.ST, M.E yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu D.I. Yogyakarta yang sekaligus sebagai PPK Bawaslu D.I. Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 1416/KP.04.00/SJ/04/2021 tanggal 01 April 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Dilingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipindahtugaskan ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Kepala Bagian Administrasi, maka dilakukan perubahan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Bawaslu D.I. Yogyakarta melalui Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Nomor P-084/KU.01.00/YO/04/2021 Tanggal 05 April 2021, Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Bawaslu D.I. Yogyakarta menjadi sebagai berikut:

Pejabat Pembuat Komitmen : Drs. Screning Yosmar Dano, M,Si
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Mutia Utami, S.Si
Bendahara Pengeluaran : Rosita Hestiningsih, A.Md

- Selanjutnya dalam rangka mengoptimalkan fungsi saling uji antar Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Bawaslu D.I. Yogyakarta agar pengeluaran Negara lebih efektif, efisien, dan akuntabel setelah dilantiknya Bapak Aditya Nugroho Pamungkas sebagai Kepala Bagian Adminitrasi Bawaslu D.I. Yogyakarta, maka dilakukan perubahan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Bawaslu D.I. Yogyakarta melalui Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor P-111/KU.01.00/YO/05/2021 Tanggal 03 Mei 2021, Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Bawaslu D.I. Yogyakarta menjadi sebagai berikut:

Pejabat Pembuat Komitmen : Aditya Nugroho Pamungkas, S.E., M.E.
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Mutia Utami, S.Si
Bendahara Pengeluaran : Rosita Hestiningsih, A.Md

c. Pengelolaan Aset BMN

- Aset Tetap Renovasi berupa perbaikan halaman depan Kantor Bawaslu DIY, perbaikan gedung pertemuan dan perbaikan gedung PPID yang dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Kulonprogo telah diserahkan ke Pemda dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hibah BMN berupa ATR Bawaslu D.I. Yogyakarta kepada Pemda D.I. Yogyakarta dan Pemkab Kulonprogo.
- Rincian daftar Barang Milik Negara yang tercatat pada aplikasi SIMAK BMN Bawaslu D.I. Yogyakarta dimana penetapan status penggunaan Barang Milik Negara oleh

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia antara lain berdasarkan surat sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/KM.6/WKN.09/KNL.06/2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0129A/Bawaslu/SJ/PL.07/VII/2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0230/Bawaslu/SJ/PL.07/VIII/2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/KM.6/WKN.09/KNL.06/ 2019 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0129/Bawaslu/SJ/PL.07/III/2020 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi D.I. Yogyakarta;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0005/PL.07/SJ/01/2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi D.I. Yogyakarta;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0346/PL.09/SJ/10/2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi D.I. Yogyakarta;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0346/PL.09/SJ/10/2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi D.I. Yogyakarta;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0070/PL.09/K1/12/2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi D.I. Yogyakarta.

F.4 Dampak Pandemi COVID-19

Dampak pandemi global *COVID-19* bagi Bawaslu D.I. Yogyakarta antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan kegiatan yang semula melalui tatap muka secara langsung menjadi menggunakan sarana teknologi informasi secara daring (*online*);
2. Pembatasan perjalanan dinas baik dalam maupun luar kota;
3. Penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja;
4. Penambahan belanja khusus penanganan COVID-19;
5. Pembatasan pegawai yang bekerja dari kantor (WFO);
6. Adanya refocusing anggaran dilakukan secara tepat, sederhana, dan akuntabel serta tidak

mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi utama Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

7. Kegiatan dikantor dilaksanakan sesuai protokol kesehatan terutama dengan penerapan *social* dan *physical distancing* sehingga berakibat adanya keterbatasan koordinasi secara langsung. Namun penyelesaian kegiatan penyusunan laporan keuangan dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan melakukan koordinasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi informasi.

F.6 Lain-lain

Telah dilakukan jurnal penyesuaian terkait belanja aset ekstrakomptabel dari pembelian belanja bahan berupa layar tripot TRI 1818 70 Inch/178 cm Orca sebesar Rp365.000 dengan nomor SP2D 210301301005748 tanggal 25 Mei 2021.

F.7 Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan

Sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Penerapan Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan, Satker Bawaslu D.I. Yogyakarta telah melakukan penilaian PIPK. Berdasarkan hasil penilaian penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta tidak ada temuan, baik kelemahan material, kelemahan signifikan maupun kelemahan yang berdampak rendah. Penilaian dilakukan terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi. Berdasarkan penilaian tersebut disimpulkan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah efektif sebagaimana terlampir pada lampiran 2.

LAMPIRAN I

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM D.I. YOGYAKARTA
RINCIAN NILAI PEROLEHAN, BEBAN PENYUSUTAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN DAN NILAI BUKU ASET
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021**

Uraian	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2020	Beban Penyusutan Per 31 Des 2021	Akumulasi Penyusutan Periode ini	Total Akumulasi Penyusutan Per 31 Des 2021	Nilai Buku Per 31 Des 2021
ASET TETAP							
Tanah							
Tanah	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin							
Alat Bantu	7	74.415.000	37.207.499	10.630.714	-	47.838.213	26.576.787
Alat Angkutan Darat Bermotor	7	3.424.237.500	1.912.754.364	335.885.142	-	2.248.639.506	1.175.597.994
Alat Kantor	5	789.679.500	535.642.250	134.640.500	(12.538.000)	657.744.750	131.934.750
Alat Rumah Tangga	5	1.944.347.800	1.334.401.805	314.203.645	(39.770.060)	1.608.835.390	335.512.410
Alat Studio	5	227.687.500	190.952.000	41.504.200	(52.637.500)	179.818.700	47.868.800
Alat Komunikasi	5	88.781.800	90.316.800	14.375.000	(21.190.000)	83.501.800	5.280.000
Alat Kedokteran	5	10.228.000	1.022.800	2.045.600	-	3.068.400	7.159.600
Komputer Unit	4	1.148.599.120	1.043.586.575	184.872.405	(188.015.750)	1.040.443.230	108.155.890
Peralatan Komputer	4	379.524.080	391.332.300	63.255.870	(104.304.400)	350.283.770	29.240.310
Jumlah		8.087.500.300	5.537.216.393	1.101.413.076	(418.455.710)	6.220.173.759	1.867.326.541
Gedung dan Bangunan							
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	-	-	-	-	-	-
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	-	-	-	-	-	-
Jumlah							
Jaringan							
Jaringan Listrik	40	-	-	-	-	-	-
Jaringan Telepon	20	-	-	-	-	-	-
Jumlah							
Konstruksi Dalam Pengerjaan							
Konstruksi Dalam Pengerjaan		-	-	-	-	-	-
Jumlah							
Aset Tetap Lainnya							
Gedung dan Bagunan Dalam Renovasi	10	211.888.713	-	-	-	-	211.888.713
Jumlah		211.888.713					211.888.713
JUMLAH TOTAL ASET TETAP		8.299.389.013	5.537.216.393	1.101.413.076	(418.455.710)	6.220.173.759	2.079.215.254
ASET LAINNYA							
Aset Tidak Berwujud							
Software Komputer	4	260.125.834	88.847.744	87.349.423	-	176.197.167	83.928.667
Jumlah		260.125.834	88.847.744	87.349.423	-	176.197.167	83.928.667
Aset Lain-Lain							
Aset yang tidak digunakan dalam operasi:							
Alat Kantor	5	12.988.000	8.580.000	225.000	3.958.000	12.763.000	225.000
Alat Rumah Tangga	5	43.773.350	14.795.000	1.545.585	24.975.060	41.315.645	2.457.705
Alat Studio	5	61.525.000	900.000	6.637.500	48.287.500	55.825.000	5.700.000
Alat Komunikasi	5	21.590.000	19.845.000	2.405.000	(860.000)	21.390.000	200.000
Komputer Unit	4	206.264.500	53.125.000	10.622.500	122.895.750	186.643.250	19.621.250
Peralatan Komputer	4	104.304.400	19.715.500	237.500	84.351.400	104.304.400	-
Instalasi Lain	5	-	9.375.000	-	(9.375.000)	-	-
Jumlah		450.445.250	126.335.500	21.673.085	274.232.710	422.241.295	28.203.955
JUMLAH TOTAL ASET LAIN-LAIN		710.571.084	215.183.244	109.022.508	274.232.710	598.438.462	112.132.622
JUMLAH TOTAL ASET	-	9.009.960.097	5.752.399.637	1.210.435.584	(144.223.000)	6.818.612.221	2.191.347.876

LAMPIRAN II

LAPORAN HASIL PENILAIAN
PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kami telah melaksanakan penilaian penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. Penilaian dilakukan terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Pengendalian Umum Teknologi Informasi Dan Komunikasi, dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi dengan rincian terlampir. Pengembangan dan pelaksanaan pengendalian intern sepenuhnya merupakan tanggung jawab manajemen.

Sistem pengendalian intern, meskipun dirancang dan dilaksanakan dengan baik, tetap memiliki keterbatasan sehingga terdapat kemungkinan kesalahan terjadi dan tidak terdeteksi. Oleh karena itu, meskipun dinyatakan efektif, pengendalian tersebut hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan.

Berdasarkan penilaian tersebut, kami menyimpulkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2022, pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah efektif

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah memadai .

Yogyakarta, 12 Januari 2022

KETUA TIM



Aditya Nugroho Pamungkas, SE., ME.
NIP. 19870604.201403.1.001

Lampiran

Laporan Hasil Penilaian

A. Daftar Akun Signifikan yang dinilai

1. Kas di Bendahara Pengeluaran
2. Kas Lainnya di K/L dari Hibah
3. Peralatan dan Mesin

B. Daftar Kelemahan Material dan/atau Kelemahan Signifikan

NO				Rekomendasi
	Uraian	Sebab	Akibat	
1	Tidak ada temuan, baik kelemahan material, kelemahan signifikan maupun kelemahan yang berdampak rendah (Jika Tidak ada temuan)			

LAMPIRAN III

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM 115
ESELON I : SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 686332

Kode Lap : LRA.F.S
Tanggal : 20/04/22 7:46 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --

NO	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	6,000,001	6,000,001	0	0	2,974,555	2,974,555	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	6,000,001	6,000,001	0	0	2,974,555	2,974,555	0
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	6,272,351,000	6,145,034,156	(127,316,844)	98	6,004,510,000	5,499,802,573	(504,707,427)	92
	BELANJA BARANG	9,428,347,000	9,291,658,221	(136,688,779)	99	31,825,263,000	29,044,898,091	(2,780,364,909)	91
	BELANJA MODAL	430,573,000	428,092,673	(2,480,327)	99	474,700,000	461,802,905	(12,897,095)	97
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	16,131,271,000	15,864,785,050	(266,485,950)	98	38,304,473,000	35,006,503,569	(3,297,969,431)	98
C	PEMBIAYAAN				0				0

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115 BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : 01 SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KDUAPPAW : 115010400KD BA(115) ES1(01) DI YOGYAKARTA
KODE SATKER : 686332 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Tgl. Cetak 20/04/2022 7:46 PM
lap_neraca_satker_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	5,754,180	2,245,090,855	(2,239,336,675)	(99.74)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	16,500,000	(16,500,000)	(100.00)
Persediaan	0	1,610,135	(1,610,135)	(100.00)
JUMLAH ASET LANCAR	5,754,180	2,263,200,990	(2,257,446,810)	(99.75)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	8,087,500,300	8,482,999,550	(395,499,250)	(4.66)
Aset Tetap Lainnya	211,888,713	615,159,719	(403,271,006)	(65.56)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(6,220,173,759)	(5,537,216,393)	(682,957,366)	12.33
JUMLAH ASET TETAP	2,079,215,254	3,560,942,876	(1,481,727,622)	(41.61)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	260,125,834	131,232,874	128,892,960	98.22
Aset Lain-lain	450,445,250	128,878,000	321,567,250	249.51
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(598,438,462)	(215,183,244)	(383,255,218)	178.11
JUMLAH ASET LAINNYA	112,132,622	44,927,630	67,204,992	149.58
JUMLAH ASET	2,197,102,056	5,869,071,496	(3,671,969,440)	(62.56)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	25,516,516	25,679,912	(163,396)	(0.64)
Utang Jangka Pendek Lainnya	5,754,180	0	5,754,180	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31,270,696	25,679,912	5,590,784	21.77
JUMLAH KEWAJIBAN	31,270,696	25,679,912	5,590,784	21.77
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	2,165,831,360	5,843,391,584	(3,677,560,224)	(62.94)
JUMLAH EKUITAS	2,165,831,360	5,843,391,584	(3,677,560,224)	(62.94)
JUMLAH EKUITAS	2,165,831,360	5,843,391,584	(3,677,560,224)	(62.94)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,197,102,056	5,869,071,496	(3,671,969,440)	(62.56)

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0400
SATUAN KERJA : 686332

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DI YOGYAKARTA
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Tgl. Cetak 20/04/2022 7:47 PM
lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	266,485,950	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	6,000,001	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	687,766,000
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	321,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	48,171,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	13,580,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	101,360,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	26,200,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	67,584,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	86,384,000
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	193,914,000
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	27,015,000
2.0	511332	Allotment Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	0	4,024,394,000
2.0	512211	Allotment Belanja Uang Lembur	0	195,274,000
2.0	512411	Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	800,388,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	3,832,931,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	10,800,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	276,652,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	101,935,000
2.0	521131	Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	195,160,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	739,399,000
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	39,520,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	0
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	12,000,000
2.0	521841	Allotment Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	3,000,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	144,360,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	8,700,000
2.0	522113	Allotment Belanja Langganan Air	0	1,020,000
2.0	522119	Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	5,950,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	402,900,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	45,900,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	134,626,000
2.0	522192	Allotment Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	64,415,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	263,830,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	491,442,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	1,957,842,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	239,160,000
2.0	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	327,305,000

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0400
SATUAN KERJA : 686332

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DI YOGYAKARTA
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Tgl. Cetak 20/04/2022 7:47 PM
lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	129,500,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	87,990,000
2.0	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya	0	342,583,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	6,000,001
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	677,222,760	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13,345	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1,112
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	35,331,538	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	9,692,392	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	95,970,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	2,940,200
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	25,860,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	60,724,066	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	35,847,900	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	180,005,400	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	26,310,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	1,095,000
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	4,013,459,600	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	193,730,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	794,903,467	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,800,872,883	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,528,600	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	274,084,000	0
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	2,137,500
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	92,122,570	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	171,822,532	0
3.0	521211	Belanja Bahan	727,101,575	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	39,520,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	11,732,500	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	2,176,900	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	135,846,166	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	3,831,673	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	827,500	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5,644,200	0
3.0	522141	Belanja Sewa	402,460,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	45,900,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	134,325,000	0
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	56,789,000	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115
 UNIT ORGANISASI : 01
 WILAYAH/PROVINSI : 0400
 SATUAN KERJA : 686332

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
 SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 DI YOGYAKARTA
 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Tgl. Cetak 20/04/2022 7:47 PM
 lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	263,654,588	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	486,251,542	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	1,948,171,492	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	1,227,000
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	233,300,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	324,090,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	128,970,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87,311,000	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	340,781,673	0
JUMLAH			16,144,671,813	16,144,671,813

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0400
SATUAN KERJA : 686332

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DI YOGYAKARTA
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Tgl. Cetak 20/04/2022 7:47 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	5,754,180	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	0	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	0	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	8,087,500,300	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	211,888,713	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	6,220,173,759
0.0	162151	Software	260,125,834	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	450,445,250	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	422,241,295
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	176,197,167
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	6,420,387
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	19,096,129
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	5,754,180
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	14,762,759,592
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	6,000,001	0
0.0	391111	Ekuitas	0	5,843,391,584
0.0	391119	Koreksi Lainnya	1,143,065,397	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	6,000,001
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	680,318,040	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	13,534	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	1,112
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	35,486,302	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	9,723,346	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	95,970,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	2,940,200
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	25,860,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	60,724,066	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	35,847,900	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	180,005,400	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	26,310,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	1,095,000
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	4,013,459,600	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	193,730,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	798,042,667	0

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0400
SATUAN KERJA : 686332

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DI YOGYAKARTA
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Tgl. Cetak 20/04/2022 7:47 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	3,801,195,020	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,528,600	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	274,084,000	0
3.1	521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	2,137,500
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	92,122,570	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	171,822,532	0
3.0	521211	Beban Bahan	722,856,575	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	39,520,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	135,325,973	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,776,446	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	727,000	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5,644,200	0
3.0	522141	Beban Sewa	418,960,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	45,900,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	134,325,000	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	56,789,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	263,654,588	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	486,251,542	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	1,946,821,492	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	1,227,000
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	233,300,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	324,090,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	128,970,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,101,413,076	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	87,349,423	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	21,673,085	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	15,519,535	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	365,000	0
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	632,179,719	0
JUMLAH			27,469,434,906	27,469,434,906

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 115 BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
 ESELON I : 01 SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Kode Lap : LO.SAT
 WILAYAH/PROVINSI : 0400 DI YOGYAKARTA Tanggal : 20/04/22 7:48 PM
 SATUAN KERJA : 686332 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI D.I. YOGYAKARTA Halaman : 1
 JENIS SATUAN KERJA : KD Prg ID : lap_lo_satker --
 Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	6,151,454,543	5,499,802,573	651,651,970	11.849
Beban Persediaan	15,519,535	812,459,454	(796,939,919)	(98.09)
Beban Barang dan Jasa	5,905,804,416	24,393,159,599	(18,487,355,183)	(75.789)
Beban Pemeliharaan	749,906,130	1,061,657,142	(311,751,012)	(29.365)
Beban Perjalanan Dinas	2,631,954,492	4,004,837,503	(1,372,883,011)	(34.281)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN	: 115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	Kode Lap	: LO.SAT
ESELON I	: 01	SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	Tanggal	: 20/04/22 7:48 PM
WILAYAH/PROVINSI	: 0400	DI YOGYAKARTA	Halaman	: 2
SATUAN KERJA	: 686332	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	Prg ID	: lap_lo_satker --
JENIS SATUAN KERJA	: KD		Tgl Data	: 20/05/19 12:00 AM

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,210,435,584	1,373,029,904	(162,594,320)	(11.842)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	16,665,074,700	37,144,946,175	(20,479,871,475)	(55.135)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(16,665,074,700)	(37,144,946,175)	20,479,871,475	(55.135)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(626,179,718)	789,555	(626,969,273)	(79,407.929)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	6,000,001	789,555	5,210,446	659.922
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	632,179,719	0	632,179,719	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	(111,963,946)	111,963,946	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	4,475,300	(4,475,300)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	116,439,246	(116,439,246)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(626,179,718)	(111,174,391)	(515,005,327)	463.241
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(17,291,254,418)	(37,256,120,566)	19,964,866,148	(53.588)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(17,291,254,418)	(37,256,120,566)	19,964,866,148	(53.588)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 115 BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
ESELON I : 01 SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KD
SATUAN KERJA : 686332 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Kode Lap : LPE.SATKER
Tanggal : 20/04/22 7:49 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_satker --rekon17

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	5,843,391,584	6,921,224,206	(1,077,832,622)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(17,291,254,418)	(37,256,120,566)	19,964,866,148	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(1,143,065,397)	0	(1,143,065,397)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	(1,143,065,397)	0	(1,143,065,397)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	14,756,759,591	36,178,287,944	(21,421,528,353)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(3,677,560,224)	(1,077,832,622)	(2,599,727,602)	-
EKUITAS AKHIR	2,165,831,360	5,843,391,584	(3,677,560,224)	-

LAMPIRAN IV



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA
Jl. Kusumanegara No.11 Yogyakarta
Telepon : (0274) 544091 Faksimila : (0274) 523183

Yth.

06 JUL 2021

1. Kepala Kantor Wilayah DJKN
Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
Ged. Keuangan Negara Lantai III
JL. Imam Bonjol Nomor 1 D
Kota Semarang
2. Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta
Jalan D.I. Panjaitan No. 49, RT. 03, Mantrijeron, Yogyakarta

SURAT PENGANTAR

Nomor : SP-368 /WKN.09/KNL.06/2021

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	- Salinan Risalah Lelang Nomor 248/42/2021 tanggal 16 Juni 2021	1 (satu) set	Disampaikan sebagai laporan

!

Diterima tanggal
Penerima,

A.n. Kepala Kantor
Kepala Sub Bagian Umum


Erni Ika Nurhayati
Erni Ika Nurhayati

.....
NIP.

Nomor Telepon :
Nomor Faksimile :

Catatan :
Setelah diterima, lembar kedua harap dikirimkan kembali kepada pengirim



**SALINAN/ *GROSSE*
RISALAH LELANG**

NOMOR : 248/42/2021
TANGGAL : 16 Juni 2021
PEJABAT LELANG : Muhammad Firmansyah, S.E.
PENJUAL : Badan Pengawas Pemilihan Umum
D.I. Yogyakarta

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
YOGYAKARTA**

Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd.

Muhammad Firmansyah, S.E.
NIP 19830204 200412 1 001

**SALINAN
RISALAH LELANG
Nomor 248/42/2021**

-----Pada hari ini Rabu tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu (16-06-2021), dimulai pukul sembilan lebih tiga puluh menit (09:30) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----

----- Muhammad Firmansyah, Sarjana Ekonomi, NIP 19830204 200412 1 001 -----
Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 08/KM.6/UP.11/2013 tanggal 13 November 2013, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-704/WKN.9/KNL.06/2021 tanggal 24 Mei 2021, dengan dihadiri para saksi yang akan disebut pada bagian kaki Risalah Lelang ini dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, Jalan Kusumanegara No. 11, Yogyakarta. -----

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Doktorandus Screning Yosmar Dano, Magister of Science, Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Kota Yogyakarta, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor 110/PL.08/YO/05/2021 tanggal 05 Mei 2021, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S-2548/WKN.09/KNL.06/2021 tanggal 20 Mei 2021 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor 0132/PL.08/SJ/04/2021 tanggal 08 April 2021. -----

-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: -----
Fajar Marchito Saleh, Sarjana Ekonomi berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor 035/PL.08/YO/01/2021 tanggal 15 Januari 2021 melaksanakan penjualan lelang dengan perantara KPKNL Yogyakarta. -----

-----Barang bergerak yang dilelang berupa: -----
1 paket barang eks peralatan mesin terdiri dari whiteboard, kursi besi/metal, televisi, sound system, handy cam, tempat sampah, UPS, voice recorder, camera digital, telepon lapangan, P.C Unit dan lain-lain dalam kondisi rusak berat. -----
Nilai Limit : Rp2.789.500,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta Jalan D.I. Panjaitan No. 49, RT. 03, Mantrijeron, Yogyakarta. -----
dilelang apa adanya. -----

-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran/pengumuman tempel tanggal 02 Juni 2021. -----

-----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----

-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jis. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----

-----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----

-----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah

menunjukkan identitas.../Lembar Kedua

Lembar kedua dari Risalah Lelang Nomor : 248/42/2021 tanggal 16 Juni 2021

Pejabat Lelang

Ttd.

Muhammad Firmansyah, S.E.
NIP 19830204 200412 1 001

menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: -----

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----

---b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----

---c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----

---b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----

---c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

----Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara tertutup (closed bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. ---

----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----

1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----

2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----

----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----

1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----

2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --

1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----

2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

----Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga

penawaran yang.../Lembar Ketiga

Lembar ketiga dari Risalah Lelang Nomor : 248/42/2021 tanggal 16 Juni 2021

Pejabat Lelang

Ttd.

Muhammad Firmansyah, S.E.
NIP 19830204 200412 1 001

penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----

----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----
2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----

----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----

----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. -----

----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----

----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----

----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----

----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----

----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan

dalam Peraturan.../Lembar Keempat

Ttd.

Muhammad Firmansyah, S.E.
NIP 19830204 200412 1 001

dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----

----Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

----Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

----Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----

----Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. ----

----Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----

----Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----

----Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----

----Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----

----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----

----Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----

----Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----

----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----

----Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 248/42/2021 tanggal 16 Juni 2021

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) -----

Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) -----

Jumlah harga barang yang laku/telah terjual: Rp6.000.001,00 (enam juta satu rupiah)

Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) -----

Jumlah harga barang yang ditahan: -----

Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 9 (sembilan) -----

Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. -----

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

Fajar Marchito Saleh, S.E.

Muhammad Firmansyah, S.E.
NIP 19830204 200412 1 001

Saksi II

Saksi I

Ttd.

Ttd.

Marcelina Shinta Dewi

B. Ika Apriandini

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya

Tanggal:

Kepala KPKNL Yogyakarta



Marhaeni Rumiasih

NIP 19690404 199603 2 001



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820210618335353
Tanggal Billing : 18-06-2021 10:18:06
Tanggal Kedaluwarsa : 25-06-2021 10:18:06
Tanggal Bayar : 18-06-2021 13:37:08
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar : *Internet Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL YOGYAKARTA
Kementerian/Lembaga : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Unit Eselon I : Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Satuan Kerja : SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
Total Disetor : 6.000.001 (IDR)
Terbilang : *Enam Juta Satu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **210618765419**
NTPN : **71F8B3CIEOCDV03P**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun : 425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran : 6.000.001 (IDR)
Keterangan : HBL tgl 17_06_2021 Lot 1 RL 248



**Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)**

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820210618333289
Tanggal Billing : 18-06-2021 10:07:27
Tanggal Kedaluwarsa : 25-06-2021 10:07:27
Tanggal Bayar : 18-06-2021 13:37:08
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar : *Internet Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL YOGYAKARTA
Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I : Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA
Total Disetor : 120.001 (IDR)
Terbilang : *Seratus Dua Puluh Ribu Satu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : 210618765414
NTPN : EE8D18N3DNQOCU39

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli -
3.Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun : 425782 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran : 120.001 (IDR)
Keterangan : BL Pembeli, RL No.248 Lot 1, tgl.2021-06-17





**Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNPB ONLINE (SIMPONI)**

**RINCIAN PEMBUATAN TAGIHAN PENERIMAAN NEGARA LAINNYA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

1. Data Tagihan :

Kode Billing : 820211103449885
Tanggal Billing : 03-11-2021 08:36:55
Tanggal Kedaluwarsa : 10-11-2021 08:36:55
Mata Uang : IDR
Tanggal Bayar : 03-11-2021 14:00:10
Bank/Pos/*Fintech* Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : *Teller*
Nama Penyetor : Bendahara Pengeluaran Sekretariat Bawaslu Prov DIY
Jenis Setoran : Setoran Pengembalian Belanja
Kementerian/Lembaga : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Unit Eselon I : Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Satuan Kerja : SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
Total Disetor : 33.060.000
Terbilang : Tiga puluh tiga juta enam puluh ribu (IDR)
Status : Sudah Dibayar
NTB : 000000348316
NTPN : 6D39255DEDVLDGOT
KPPN : 030 - YOGYAKARTA
Program : Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
Sumber Dana : (RM) - RUPIAH MURNI
Cara Penarikan : RM
No. Register : 00000001

Kewenangan : Kantor Daerah
Keterangan : Pengembalian dari PPSDM Biaya Diklat PKA (1 orang) dan PKP (5 orang)

2. Detail Tagihan :

Wajib Bayar	Lokasi Kab/Kota	Kegiatan Output	Akun	Periode (dari)	Periode (s/d)	Jumlah
Bendahara Pengeluaran	04 - DI YOGYAKARTA 51 - KOTA YOGYAKARTA	5245 - Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc EAF - Layanan SDM	522191 - Belanja Jasa Lainnya	-	-	33.060.000



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1
YOGYAKARTA

JL. KUSUMANEGARA NO. 11, YOGYAKARTA 55166; TELEPON (0274) 542011; FAKSIMILE (0274) 554634; LAMAN
WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/YOGYAKARTA

Nomor : S-2040/WPB.15/KP.01/2021 12 November 2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu DIPA (686332)

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran BAWASLU Yogyakarta

Sehubungan dengan Surat Pernyataan Koreksi atas Realisasi Anggaran Belanja Negara nomor tanggal , KPPN Yogyakarta telah melakukan penyesuaian sisa pagu DIPA nomor DIPA-115.01.2.686332/2021 tanggal 23 November 2020, dengan rincian sebagai berikut :

1.	Jumlah Uang	:	Rp 33.060.000
2.	Yang Berhak Menerima	:	Bendahara Pengeluaran Sekretariat Bawaslu Provinsi DIY
3.	Atas Beban		
	a. Fungsi, Sub Fungsi, Program	:	01/01/CQ
	b. Kegiatan, Output	:	5245EAF
	c. Klasifikasi Belanja	:	5221
	d. Mata Anggaran	:	522191
	e. Bagian Anggaran	:	115
	f. Satuan Kerja	:	686332
	g. Lokasi	:	0451

Berdasarkan penyesuaian tersebut diatas, selanjutnya Saudara diminta untuk melakukan penyesuaian sisa pagu DIPA pada database melalui Aplikasi SAS.

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Yogyakarta



Ditandatangani secara elektronik
Rizki Tavianto Karipany





**Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)**

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 820211107934670
Tanggal Billing : 07-11-2021 20:27:22
Tanggal Kedaluwarsa : 14-11-2021 20:27:22
Tanggal Bayar : 12-11-2021 08:20:11
Bank/Pos/*Fintech* Bayar : POS INDONESIA
Channel Bayar : *Teller*
Nama Penyetor : Bendahara Pengeluaran Sekretariat Bawaslu Prov DIY
Kementerian Negara/Lembaga : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Unit Eselon I : Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Satuan Kerja : SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
Total Disetor : 26.192
Terbilang : *Dua puluh enam ribu Seratus sembilan puluh dua (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **911833902387**
NTPN : **711F40N9V93RLCEE**

Detail pembayaran tagihan :

Lokasi : -
Akun : 815511 - Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dana
Rupiah
Jumlah Setoran : 26.192
Keterangan : Pengembalian Sisa TUP



**Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)**

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 820211228956444
Tanggal Billing : 28-12-2021 11:26:17
Tanggal Kedaluwarsa : 04-01-2022 11:26:17
Tanggal Bayar : 28-12-2021 13:40:40
Bank/Pos/*Fintech* Bayar : POS INDONESIA
Channel Bayar : *Teller*
Nama Penyetor : Bendahara Pengeluaran Sekretariat Bawaslu Prov DIY
Kementerian Negara/Lembaga : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Unit Eselon I : Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Satuan Kerja : SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
Total Disetor : 2.137.500
Terbilang : *Dua juta Seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **550092589703**
NTPN : **808F048VUJH0MLOS**

Detail pembayaran tagihan :

Lokasi : DI YOGYAKARTA-KOTA YOGYAKARTA
Akun : 521115 - Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
Jumlah Setoran : 2.137.500
Keterangan : Pengembalian Honor PPSPM an. Mutia Utami Bulan Januari-Maret 2021



**Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)**

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 820211228958941
Tanggal Billing : 28-12-2021 11:33:04
Tanggal Kedaluwarsa : 04-01-2022 11:33:04
Tanggal Bayar : 28-12-2021 13:38:46
Bank/Pos/*Fintech* Bayar : POS INDONESIA
Channel Bayar : *Teller*
Nama Penyetor : Bendahara Pengeluaran Sekretariat Bawaslu Prov DIY
Kementerian Negara/Lembaga : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Unit Eselon I : Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Satuan Kerja : SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
Total Disetor : 1.227.000
Terbilang : *Satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **911809589446**
NTPN : **4FEC51JNF3PRFO6T**

Detail pembayaran tagihan :

Lokasi : DI YOGYAKARTA-KOTA YOGYAKARTA
Akun : 524111 - Belanja Perjalanan Biasa
Jumlah Setoran : 1.227.000
Keterangan : Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjudin an, Ria Harlinawati dan Panggih Widodo



**Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)**

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 820211229133806
Tanggal Billing : 29-12-2021 20:31:03
Tanggal Kedaluwarsa : 05-01-2022 20:31:03
Tanggal Bayar : 30-12-2021 10:19:27
Bank/Pos/*Fintech* Bayar : POS INDONESIA
Channel Bayar : *Teller*
Nama Penyetor : Bendahara Pengeluaran Sekretariat Bawaslu Prov DIY
Kementerian Negara/Lembaga : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Unit Eselon I : Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Satuan Kerja : SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
Total Disetor : 31.640.509
Terbilang : *Tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus sembilan (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **954595617225**
NTPN : **F65CC61QU8LPM2VE**

Detail pembayaran tagihan :

Lokasi : -
Akun : 815511 - Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dana
Rupiah
Jumlah Setoran : 31.640.509
Keterangan : Pengembalian Sisa Tambahan Uang Persediaan TA 2021



**Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)**

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 820211230191012
Tanggal Billing : 30-12-2021 12:33:08
Tanggal Kedaluwarsa : 06-01-2022 12:33:08
Tanggal Bayar : 30-12-2021 14:09:45
Bank/Pos/*Fintech* Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : *Teller*
Nama Penyetor : Bendahara Pengeluaran Sekretariat Bawaslu Prov DIY
Kementerian Negara/Lembaga : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Unit Eselon I : Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Satuan Kerja : SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
Total Disetor : 107.297.482
Terbilang : *Seratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh dua (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **00000775949**
NTPN : **204C22G4UUC92BD4**

Detail pembayaran tagihan :

Lokasi : -
Akun : 815111 - Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Rupiah
Jumlah Setoran : 107.297.482
Keterangan : Pengembalian Sisa Uang Persediaan TA 2021

LAMPIRAN V

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TAHUN ANGGARAN 2021

Tanggal : 21-04-2022
Halaman : 1
Kode Lap. : LBAPKT

NAMA UAKPB : 115.01.04.686332.000 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DIY

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	0
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0
117131	Bahan Baku	0
117199	Persediaan Lainnya	0
132111	Peralatan dan Mesin	8,087,500,300
134113	Jaringan	0
135111	Aset Tetap dalam Renovasi	211,888,713
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6,220,173,759)
162151	Software	260,125,834
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	450,445,250
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	(422,241,295)
169315	Akumulasi Amortisasi software	(176,197,167)
J U M L A H		2,191,347,876



LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TAHUN ANGGARAN 2021

Tanggal : 21-04-2022
Halaman : 1
Kode Lap. : LBAPKT

NAMA UAKPB : 115.01.04.686332.000 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DIY

AKUN NERACA		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI BMN	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
117111	Barang Konsumsi	0	0	0
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0
117131	Bahan Baku	0	0	0
117199	Persediaan Lainnya	0	0	0
132111	Peralatan dan Mesin	8,087,500,300	6,220,173,759	1,867,326,541
134113	Jaringan	0	0	0
135111	Aset Tetap dalam Renovasi	211,888,713	0	211,888,713
162151	Software	260,125,834	176,197,167	83,928,667
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	450,445,250	422,241,295	28,203,955
J U M L A H		9,009,960,097	6,818,612,221	2,191,347,876

Yogyakarta,
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang
Drs. Sorening Kusmar Dano, M.Si
NIP. 19700513 198903 1 001



LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
 INTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2021

Tanggal : 21-04-2022
 Halaman : 1
 Kode Lap. : LBSISSKT

NAMA UAKPB : 115.01.04.686332 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DIY

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			1 JANUARI 2021		BERTAMBAH		BERKURANG		31 DESEMBER 2021	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	PERALATAN DAN MESIN		1,476	8,482,999,550	15	87,311,000	76	482,810,250	1,415	8,087,500,300
3.01.03.04.001	Transportable Generating Set	Unit	1	74,415,000	0	0	0	0	1	74,415,000
3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	10	3,376,866,000	0	0	0	0	10	3,376,866,000
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	Unit	3	47,371,500	0	0	0	0	3	47,371,500
3.05.01.01.008	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	Buah	2	3,888,000	0	0	1	1,944,000	1	1,944,000
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	Buah	43	161,348,500	0	0	0	0	43	161,348,500
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	Buah	16	88,111,500	0	0	0	0	16	88,111,500
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	Buah	59	140,581,000	0	0	0	0	59	140,581,000
3.05.01.04.007	Brandkas	Buah	7	56,694,500	0	0	0	0	7	56,694,500
3.05.01.04.013	Buffet	Buah	2	9,960,000	0	0	0	0	2	9,960,000
3.05.01.05.001	Tabung Pemadam Api	Buah	12	45,305,000	0	0	0	0	12	45,305,000
3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	9,975,000	0	0	0	0	1	9,975,000
3.05.01.05.010	White Board	Buah	18	22,477,000	0	0	1	797,000	17	21,680,000
3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	Buah	9	15,320,000	0	0	2	2,250,000	7	13,070,000
3.05.01.05.017	Mesin Absensi	Buah	6	16,647,000	0	0	1	7,997,000	5	8,650,000
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	Buah	25	226,160,000	0	0	0	0	25	226,160,000
3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	5	6,200,000	0	0	0	0	5	6,200,000
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	217	456,968,400	0	0	6	13,890,600	211	443,077,800
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	531	396,107,250	0	0	5	7,025,250	526	389,082,000
3.05.02.01.004	Kursi Kayu	Buah	5	13,250,000	0	0	0	0	5	13,250,000
3.05.02.01.005	Sice	Buah	18	184,888,000	0	0	0	0	18	184,888,000
3.05.02.01.008	Meja Rapat	Buah	8	79,259,500	0	0	0	0	8	79,259,500
3.05.02.01.017	Sketsel	Buah	1	12,000,000	0	0	0	0	1	12,000,000
3.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1	1,485,000	0	0	0	0	1	1,485,000

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
 INTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2021

Tanggal : 21-04-2022
 Halaman : 2
 Kode Lap. : LBSISSKT

NAMA UAKPB : 115.01.04.686332 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DIY

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.05.02.04.001	Lemari Es	Buah	5	8,250,000	1	3,450,000	2	3,300,000	4	8,400,000
3.05.02.04.004	A.C. Split	Buah	64	468,478,000	10	49,925,000	2	11,555,000	72	506,848,000
3.05.02.06.002	Televisi	Buah	17	82,400,000	0	0	0	0	17	82,400,000
3.05.02.06.008	Sound System	Buah	8	88,900,000	0	0	0	0	8	88,900,000
3.05.02.06.012	Wireless	Buah	2	16,005,000	0	0	1	8,002,500	1	8,002,500
3.05.02.06.020	Camera Video	Buah	2	31,425,000	0	0	0	0	2	31,425,000
3.05.02.06.030	Tiang Bendera	Buah	1	3,200,000	0	0	0	0	1	3,200,000
3.05.02.06.036	Dispenser	Buah	20	52,130,000	0	0	0	0	20	52,130,000
3.05.02.06.046	Handy Cam	Buah	9	39,450,000	0	0	0	0	9	39,450,000
3.05.02.99.999	Alat Rumah Tangga Lainnya		1	550,000	0	0	0	0	1	550,000
3.06.01.01.036	Microphone/Wireless MIC	Buah	4	12,805,000	0	0	0	0	4	12,805,000
3.06.01.01.088	Voice Recorder	Buah	13	24,346,000	1	1,375,000	0	0	14	25,721,000
3.06.01.01.999	Peralatan Studio Audio Lainnya		0	0	1	3,366,000	0	0	1	3,366,000
3.06.01.02.061	Lensa Kamera	Buah	0	0	1	20,845,000	0	0	1	20,845,000
3.06.01.02.128	Camera Digital	Buah	25	234,850,500	0	0	8	69,900,000	17	164,950,500
3.06.02.01.003	Pesawat Telephone	Buah	8	31,341,800	0	0	2	20,000,000	6	11,341,800
3.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	Buah	5	12,900,000	0	0	0	0	5	12,900,000
3.06.02.01.010	Facsimile	Buah	3	5,580,000	0	0	1	1,590,000	2	3,990,000
3.06.02.01.015	Telepon Lapangan	Buah	5	15,750,000	0	0	0	0	5	15,750,000
3.06.02.09.999	Alat Komunikasi Digital Dan Konvensional Lainnya		4	44,800,000	0	0	0	0	4	44,800,000
3.07.01.01.049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Buah	6	10,228,000	0	0	0	0	6	10,228,000
3.10.01.02.001	P.C Unit	Buah	76	681,025,000	0	0	6	65,700,000	70	615,325,000
3.10.01.02.002	Lap Top	Buah	84	687,828,620	0	0	20	154,554,500	64	533,274,120
3.10.01.02.003	Note Book	Buah	1	10,000,000	0	0	1	10,000,000	0	0

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
 INTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2021

Tanggal : 21-04-2022
 Halaman : 3
 Kode Lap. : LBSISSKT

NAMA UAKPB : 115.01.04.686332 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DIY

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			1 JANUARI 2021		BERTAMBAH		BERKURANG		31 DESEMBER 2021	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	93	238,684,480	0	0	12	40,380,400	81	198,304,080
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	13	175,044,000	0	0	5	63,924,000	8	111,120,000
3.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	Buah	5	4,750,000	1	8,350,000	0	0	6	13,100,000
3.10.02.04.001	Server	Buah	2	57,000,000	0	0	0	0	2	57,000,000
135111	ASET TETAP DALAM RENOVASI		7	615,159,719	3	211,888,713	7	615,159,719	3	211,888,713
6.07.03.01.001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi		7	615,159,719	3	211,888,713	7	615,159,719	3	211,888,713
166112	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN		40	128,878,000	76	482,810,250	44	161,243,000	72	450,445,250
3.05.01.01.008	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	Buah	0	0	1	1,944,000	0	0	1	1,944,000
3.05.01.05.010	White Board	Buah	4	8,580,000	1	797,000	4	8,580,000	1	797,000
3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	Buah	0	0	2	2,250,000	0	0	2	2,250,000
3.05.01.05.017	Mesin Absensi	Buah	0	0	1	7,997,000	0	0	1	7,997,000
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	0	0	6	13,890,600	0	0	6	13,890,600
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	10	4,900,000	5	7,025,250	10	4,900,000	5	7,025,250
3.05.02.04.001	Lemari Es	Buah	0	0	2	3,300,000	0	0	2	3,300,000
3.05.02.04.004	A.C. Split	Buah	0	0	2	11,555,000	0	0	2	11,555,000
3.05.02.06.002	Televisi	Buah	1	3,495,000	0	0	1	3,495,000	0	0
3.05.02.06.008	Sound System	Buah	1	6,400,000	0	0	1	6,400,000	0	0
3.05.02.06.012	Wireless	Buah	0	0	1	8,002,500	0	0	1	8,002,500
3.06.01.01.088	Voice Recorder	Buah	1	1,000,000	0	0	1	1,000,000	0	0
3.06.01.02.128	Camera Digital	Buah	0	0	8	69,900,000	1	8,375,000	7	61,525,000
3.06.02.01.003	Pesawat Telephone	Buah	0	0	2	20,000,000	0	0	2	20,000,000
3.06.02.01.010	Facsimile	Buah	0	0	1	1,590,000	0	0	1	1,590,000
3.06.02.01.015	Telepon Lapangan	Buah	7	22,050,000	0	0	7	22,050,000	0	0
3.10.01.02.001	P.C Unit	Buah	3	27,655,000	6	65,700,000	3	27,655,000	6	65,700,000

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
 INTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2021

Tanggal : 21-04-2022
 Halaman : 4
 Kode Lap. : LBSISSKT

MA UAKPB : 115.01.04.686332 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DIY

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			1 JANUARI 2021		BERTAMBAH		BERKURANG		31 DESEMBER 2021	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.01.02.002	Lap Top	Buah	3	25,470,000	20	154,554,500	6	49,460,000	17	130,564,500
.01.02.003	Note Book	Buah	0	0	1	10,000,000	0	0	1	10,000,000
.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	5,738,000	12	40,380,400	2	5,738,000	12	40,380,400
.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	5	63,924,000	0	0	5	63,924,000
.02.03.017	External/ Portable Hardisk	Buah	2	1,900,000	0	0	2	1,900,000	0	0
.02.04.001	Server	Buah	1	6,980,000	0	0	1	6,980,000	0	0
.02.04.003	Hub	Buah	1	1,485,000	0	0	1	1,485,000	0	0
.02.04.021	Kabel UTP	Buah	1	2,035,000	0	0	1	2,035,000	0	0
.02.04.026	Access Point	Buah	1	1,320,000	0	0	1	1,320,000	0	0
.02.04.999	Peralatan Jaringan Lainnya		1	495,000	0	0	1	495,000	0	0
.10.01.999	Instalasi Lain-lain		1	9,375,000	0	0	1	9,375,000	0	0
TOTAL				9,227,037,269		782,009,963		1,259,212,969		8,749,834,263

Yogyakarta,
 Bertanggung Jawab UAKPB
 Kuasa Pengguna Barang

 Drs. Sorghino Yosmar Dano, M.Si
 NIK 19700513 198903 1 001

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
 EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2021

Tanggal : 21-04-2022
 Halaman : 1
 Kode Lap. : LBSESSKT

MA UAKPB : 115.01.04.686332 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DIY

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	PERALATAN DAN MESIN		45	25,050,000	1	365,000	0	0	46	25,415,000
01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	0	0	1	365,000	0	0	1	365,000
02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	45	25,050,000	0	0	0	0	45	25,050,000
TOTAL				25,050,000		365,000		0		25,415,000



LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2021

Tanggal : 21-04-2022
 Halaman : 1
 Kode Lap. : LBSGSSKT

NAMA UAKPB : 115.01.04.686332 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DIY

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	PERALATAN DAN MESIN		1,521	8,508,049,550	16	87,676,000	76	482,810,250	1,461	8,112,915,300
3.01.03.04.001	Transportable Generating Set	Unit	1	74,415,000	0	0	0	0	1	74,415,000
3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	10	3,376,866,000	0	0	0	0	10	3,376,866,000
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	Unit	3	47,371,500	0	0	0	0	3	47,371,500
3.05.01.01.008	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	Buah	2	3,888,000	0	0	1	1,944,000	1	1,944,000
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	Buah	43	161,348,500	0	0	0	0	43	161,348,500
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	Buah	16	88,111,500	0	0	0	0	16	88,111,500
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	Buah	59	140,581,000	0	0	0	0	59	140,581,000
3.05.01.04.007	Brandkas	Buah	7	56,694,500	0	0	0	0	7	56,694,500
3.05.01.04.013	Buffet	Buah	2	9,960,000	0	0	0	0	2	9,960,000
3.05.01.05.001	Tabung Pemadam Api	Buah	12	45,305,000	0	0	0	0	12	45,305,000
3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	9,975,000	0	0	0	0	1	9,975,000
3.05.01.05.010	White Board	Buah	18	22,477,000	0	0	1	797,000	17	21,680,000
3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	Buah	9	15,320,000	0	0	2	2,250,000	7	13,070,000
3.05.01.05.017	Mesin Absensi	Buah	6	16,647,000	0	0	1	7,997,000	5	8,650,000
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	Buah	25	226,160,000	0	0	0	0	25	226,160,000
3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	5	6,200,000	1	365,000	0	0	6	6,565,000
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	217	456,968,400	0	0	6	13,890,600	211	443,077,800
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	576	421,157,250	0	0	5	7,025,250	571	414,132,000
3.05.02.01.004	Kursi Kayu	Buah	5	13,250,000	0	0	0	0	5	13,250,000
3.05.02.01.005	Sice	Buah	18	184,888,000	0	0	0	0	18	184,888,000
3.05.02.01.008	Meja Rapat	Buah	8	79,259,500	0	0	0	0	8	79,259,500
3.05.02.01.017	Sketsel	Buah	1	12,000,000	0	0	0	0	1	12,000,000
3.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1	1,485,000	0	0	0	0	1	1,485,000

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2021

Tanggal : 21-04-2022
 Halaman : 2
 Kode Lap. : LBSGSSKT

NAMA UAKPB : 115.01.04.686332 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DIY

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.05.02.04.001	Lemari Es	Buah	5	8,250,000	1	3,450,000	2	3,300,000	4	8,400,000
3.05.02.04.004	A.C. Split	Buah	64	468,478,000	10	49,925,000	2	11,555,000	72	506,848,000
3.05.02.06.002	Televisi	Buah	17	82,400,000	0	0	0	0	17	82,400,000
3.05.02.06.008	Sound System	Buah	8	88,900,000	0	0	0	0	8	88,900,000
3.05.02.06.012	Wireless	Buah	2	16,005,000	0	0	1	8,002,500	1	8,002,500
3.05.02.06.020	Camera Video	Buah	2	31,425,000	0	0	0	0	2	31,425,000
3.05.02.06.030	Tiang Bendera	Buah	1	3,200,000	0	0	0	0	1	3,200,000
3.05.02.06.036	Dispenser	Buah	20	52,130,000	0	0	0	0	20	52,130,000
3.05.02.06.046	Handy Cam	Buah	9	39,450,000	0	0	0	0	9	39,450,000
3.05.02.99.999	Alat Rumah Tangga Lainnya		1	550,000	0	0	0	0	1	550,000
3.06.01.01.036	Microphone/Wireless MIC	Buah	4	12,805,000	0	0	0	0	4	12,805,000
3.06.01.01.088	Voice Recorder	Buah	13	24,346,000	1	1,375,000	0	0	14	25,721,000
3.06.01.01.999	Peralatan Studio Audio Lainnya		0	0	1	3,366,000	0	0	1	3,366,000
3.06.01.02.061	Lensa Kamera	Buah	0	0	1	20,845,000	0	0	1	20,845,000
3.06.01.02.128	Camera Digital	Buah	25	234,850,500	0	0	8	69,900,000	17	164,950,500
3.06.02.01.003	Pesawat Telephone	Buah	8	31,341,800	0	0	2	20,000,000	6	11,341,800
3.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	Buah	5	12,900,000	0	0	0	0	5	12,900,000
3.06.02.01.010	Facsimile	Buah	3	5,580,000	0	0	1	1,590,000	2	3,990,000
3.06.02.01.015	Telepon Lapangan	Buah	5	15,750,000	0	0	0	0	5	15,750,000
3.06.02.09.999	Alat Komunikasi Digital Dan Konvensional Lainnya		4	44,800,000	0	0	0	0	4	44,800,000
3.07.01.01.049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Buah	6	10,228,000	0	0	0	0	6	10,228,000
3.10.01.02.001	P.C Unit	Buah	76	681,025,000	0	0	6	65,700,000	70	615,325,000
3.10.01.02.002	Lap Top	Buah	84	687,828,620	0	0	20	154,554,500	64	533,274,120
3.10.01.02.003	Note Book	Buah	1	10,000,000	0	0	1	10,000,000	0	0

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2021

Tanggal : 21-04-2022
 Halaman : 3
 Kode Lap. : LBSGSSKT

NAMA UAKPB : 115.01.04.686332 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DIY

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			1 JANUARI 2021		BERTAMBAH		BERKURANG		31 DESEMBER 2021	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	93	238,684,480	0	0	12	40,380,400	81	198,304,080
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	13	175,044,000	0	0	5	63,924,000	8	111,120,000
3.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	Buah	5	4,750,000	1	8,350,000	0	0	6	13,100,000
3.10.02.04.001	Server	Buah	2	57,000,000	0	0	0	0	2	57,000,000
135111	ASET TETAP DALAM RENOVASI		7	615,159,719	3	211,888,713	7	615,159,719	3	211,888,713
6.07.03.01.001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi		7	615,159,719	3	211,888,713	7	615,159,719	3	211,888,713
166112	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN		40	128,878,000	76	482,810,250	44	161,243,000	72	450,445,250
3.05.01.01.008	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	Buah	0	0	1	1,944,000	0	0	1	1,944,000
3.05.01.05.010	White Board	Buah	4	8,580,000	1	797,000	4	8,580,000	1	797,000
3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	Buah	0	0	2	2,250,000	0	0	2	2,250,000
3.05.01.05.017	Mesin Absensi	Buah	0	0	1	7,997,000	0	0	1	7,997,000
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	0	0	6	13,890,600	0	0	6	13,890,600
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	10	4,900,000	5	7,025,250	10	4,900,000	5	7,025,250
3.05.02.04.001	Lemari Es	Buah	0	0	2	3,300,000	0	0	2	3,300,000
3.05.02.04.004	A.C. Split	Buah	0	0	2	11,555,000	0	0	2	11,555,000
3.05.02.06.002	Televisi	Buah	1	3,495,000	0	0	1	3,495,000	0	0
3.05.02.06.008	Sound System	Buah	1	6,400,000	0	0	1	6,400,000	0	0
3.05.02.06.012	Wireless	Buah	0	0	1	8,002,500	0	0	1	8,002,500
3.06.01.01.088	Voice Recorder	Buah	1	1,000,000	0	0	1	1,000,000	0	0
3.06.01.02.128	Camera Digital	Buah	0	0	8	69,900,000	1	8,375,000	7	61,525,000
3.06.02.01.003	Pesawat Telephone	Buah	0	0	2	20,000,000	0	0	2	20,000,000
3.06.02.01.010	Facsimile	Buah	0	0	1	1,590,000	0	0	1	1,590,000
3.06.02.01.015	Telepon Lapangan	Buah	7	22,050,000	0	0	7	22,050,000	0	0
3.10.01.02.001	P.C Unit	Buah	3	27,655,000	6	65,700,000	3	27,655,000	6	65,700,000

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2021

Tanggal : 21-04-2022
 Halaman : 4
 Kode Lap. : LBSGSSKT

MA UAKPB : 115.01.04.686332 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DIY

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			1 JANUARI 2021		BERTAMBAH		BERKURANG		31 DESEMBER 2021	
KODE	URAIAN		KUANITITAS	NILAI	KUANITITAS	NILAI	KUANITITAS	NILAI	KUANITITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.02.002	Lap Top	Buah	3	25,470,000	20	154,554,500	6	49,460,000	17	130,564,500
01.02.003	Note Book	Buah	0	0	1	10,000,000	0	0	1	10,000,000
02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	5,738,000	12	40,380,400	2	5,738,000	12	40,380,400
02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	5	63,924,000	0	0	5	63,924,000
02.03.017	External/ Portable Hardisk	Buah	2	1,900,000	0	0	2	1,900,000	0	0
02.04.001	Server	Buah	1	6,980,000	0	0	1	6,980,000	0	0
02.04.003	Hub	Buah	1	1,485,000	0	0	1	1,485,000	0	0
02.04.021	Kabel UTP	Buah	1	2,035,000	0	0	1	2,035,000	0	0
02.04.026	Access Point	Buah	1	1,320,000	0	0	1	1,320,000	0	0
02.04.999	Peralatan Jaringan Lainnya		1	495,000	0	0	1	495,000	0	0
10.01.999	Instalasi Lain-lain		1	9,375,000	0	0	1	9,375,000	0	0
TOTAL				9,252,087,269		782,374,963		1,259,212,969		8,775,249,263

Yogyakarta,
 Penanggung Jawab UAKPB
 Kuasa Pengguna Barang
 Drs. Screning Tosmar Dano, M.Si
 NIP. 19770513 198903 1 001



LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
 ASET TAK BERWUJUD
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2021

Tanggal : 21-04-2022
 Halaman : 1
 Kode Lap. : LBSTSSKT

MA UAKPB : 115.01.04.686332 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DIY

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	SOFTWARE		6	131,232,874	3	128,892,960	0	0	9	260,125,834
.01.01.001	Software Komputer		6	131,232,874	3	128,892,960	0	0	9	260,125,834
	TOTAL			131,232,874		128,892,960		0		260,125,834

Yogyakarta,
 Bertanggung Jawab UAKPB
 Kuasa Pengguna Barang

 Drs. Serehng Yosmar Dano, M.Si
 NIP. 19700513 198903 1 001

REGISTER TRANSAKSI HARIAN
TRANSAKSI PEMBELIAN
PERIODE: 1 JANUARI 2021 S/D 31 DESEMBER 2021

Tgl Cetak : 16-01-2022

Halaman : 1

NAMA UAKPB : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DIY

KODE UAKPB : 115.01.0400.686332.000.KD

No. URUT	NO. SPPA KD. ASET NO. ASET	TGL.PERLH. TGL. BUKU NO_BUKTI	KETERANGAN JUMLAH NILAI PER SATUAN	NAMA ASET ASAL PEROLEH TOTAL RUPIAH	TGL.SP2D	TERCATAT KONDISI NO.SP2D	JNS. BLJ	MERK/TYPE ASET DASAR HARGA RPH.SPM
8 - 8	1. A02211 6070301001	05-03-2021 05-03-2021 053/PL.06/YO/02/2021	Gedung Provinsi 1 78,822,150	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi Pembelian 78,822,150	05-03-2021	2. DIL 1. Baik 210301303002070	53611	Renovasi Gedung 1. Harga Perolehan. 78,822,150
9 - 9	11. A02212	19-04-2021 19-04-2021 082.A/PL.06/YO/04/20	Gedung Provinsi 1 88,167,423	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi Pembelian 88,167,423	19-04-2021	2. DIL 1. Baik 210301303005381	53611	Renovasi Gedung 1. Harga Perolehan. 88,167,423
8 - 8	17. A02213 3100203017	22-04-2021 22-04-2021 210301301003915	HD Ext WD My Cloud Ex2 Ultra 1 Buah 8,350,000	External/ Portable Hardisk Pembelian 8,350,000	22-04-2021	1. DIR 1. Baik 210301301003915	53211	External/Portable Hardisk 1. Harga Perolehan. 8,350,000
65 - 65	18. A02214 3050204004	07-05-2021 07-05-2021 210301301004957	LG 1 PK 1 Buah 4,575,000	A.C. Split Pembelian 4,575,000	07-05-2021	1. DIR 1. Baik 210301301004957	53211	LG, AC E-10SV5, 1 PK 1. Harga Perolehan. 4,575,000
66 - 66	19. A02215	07-05-2021 07-05-2021 210301301004957	LG 1 PK 1 Buah 4,575,000	A.C. Split Pembelian 4,575,000	07-05-2021	1. DIR 1. Baik 210301301004957	53211	LG AC E-10SV5,1 PK 1. Harga Perolehan. 4,575,000
67 - 67	20. A02216	07-05-2021 07-05-2021 210301301004957	LG 1,5 PK 1 Buah 5,175,000	A.C. Split Pembelian 5,175,000	07-05-2021	1. DIR 1. Baik 210301301004957	53211	LG AC S-13EV4 1,5 PK 1. Harga Perolehan. 5,175,000
68 - 68	21. A02218	25-05-2021 25-05-2021 210301301005749	Panasonic 1 PK 1 Buah 4,500,000	A.C. Split Pembelian 4,500,000	25-05-2021	1. DIR 1. Baik 210301301005749	53211	Panasonic 1PK, 1. Harga Perolehan. 4,500,000
69 - 69	22. A02219	25-05-2021 25-05-2021 210301301005749	Sharp 2 PK 1 Buah 7,350,000	A.C. Split Pembelian 7,350,000	25-05-2021	1. DIR 1. Baik 210301301005749	53211	Sharp 2PK, AU-A18UCY 1. Harga Perolehan. 7,350,000
1 - 1	2. A022111 3060101999	07-05-2021 07-05-2021 210301301004957	Paket Audio Potcast 1 3,366,000	Peralatan Studio Audio Lainnya Pembelian 3,366,000	07-05-2021	1. DIR 1. Baik 210301301004957	53211	Audio 1. Harga Perolehan. 3,366,000
10 - 10	3. A022112 6070301001	17-06-2021 17-06-2021 210301303010210	Gedung Provinsi 1 44,899,140	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi Pembelian 44,899,140	17-06-2021	2. DIL 1. Baik 210301303010210	53611	ATR Provinsi 1. Harga Perolehan. 44,899,140

REGISTER TRANSAKSI HARIAN
TRANSAKSI PEMBELIAN
PERIODE: 1 JANUARI 2021 S/D 31 DESEMBER 2021

Tgl Cetak : 16-01-2022

Halaman : 2

NAMA UAKPB : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DIY

KODE UAKPB : 115.01.0400.686332.000.KD

No. URUT	NO. SPPA KD. ASET NO. ASET	TGL.PERLH. TGL. BUKU NO_BUKTI	KETERANGAN JUMLAH NILAI PER SATUAN	NAMA ASET ASAL PEROLEH TOTAL RUPIAH	TGL.SP2D	TERCATAT KONDISI NO.SP2D	JNS. BLJ	MERK/TYPE ASET DASAR HARGA RPH.SPM
6 - 6	4. A022113 3050105058	25-05-2021 25-05-2021 210301301005748	1 Buah 365,000	layar proyektor Focusing Screen/Layar LCD Projector Pembelian	25-05-2021	1. DIR 1. Baik	52121	TRI 1818 70 inc/178cm 1. Harga Perolehan. 365,000
1 - 1	5. A022114 3060102061	27-07-2021 27-07-2021 210301303012984	1 Buah 20,845,000	Canon EF 70-200mm f/4L IS II Lensa Kamera Pembelian	27-07-2021	1. DIR 1. Baik	53211	CANON EF 70-200mm f/4L 1. Harga Perolehan. 20,845,000
70 - 70	6. A022115 3050204004	30-07-2021 30-07-2021 SAG/2107/16393	1 Buah 5,225,000	LG AC S-13EV4 A.C. Split Pembelian	30-07-2021	1. DIR 1. Baik	53211	LG AC S-13EV4 1.5 PK 1. Harga Perolehan. 5,225,000
71 - 71	7. A022116	30-07-2021 30-07-2021 SAG/2107/16393	1 Buah 5,225,000	LG AC S-13EV4 A.C. Split Pembelian	30-07-2021	1. DIR 1. Baik	53211	LG AC S-13EV4 1.5 PK 1. Harga Perolehan. 5,225,000
72 - 72	8. A022117	30-07-2021 30-07-2021 SAG/2107/16393	1 Buah 5,225,000	LG AC S-13EV4 A.C. Split Pembelian	30-07-2021	1. DIR 1. Baik	53211	LG AC S-13EV4 1.5 PK 1. Harga Perolehan. 5,225,000
73 - 73	9. A022118	30-07-2021 30-07-2021 SAG/2107/16393	1 Buah 5,225,000	LG AC S-13EV4 A.C. Split Pembelian	30-07-2021	1. DIR 1. Baik	53211	LG AC S-13EV4 1.5 PK 1. Harga Perolehan. 5,225,000
7 - 7	10. A022119 8010101001	30-09-2021 30-09-2021 210301303018177	1 23,202,960	Aplikasi Sijuwara Software Komputer Pembelian	30-09-2021	2. DIL 1. Baik	53611	Aplikasi Sijuwara 1. Harga Perolehan. 23,202,960
6 - 6	12. A022120 3050204001	29-10-2021 29-10-2021 SAG/2110/23470	1 Buah 3,450,000	LG, L.ES GN-B215SQMT Lemari Es Pembelian	29-10-2021	1. DIR 1. Baik	53211	LG, L.ES GN-B215SQMT 1. Harga Perolehan. 3,450,000
74 - 74	13. A022121 3050204004	29-10-2021 29-10-2021 SAG/2110/23469	1 Buah 2,850,000	LG, H-05TN4 1,5 PK A.C. Split Pembelian	29-10-2021	1. DIR 1. Baik	53211	LG, H-05TN4 1,5 PK 1. Harga Perolehan. 2,850,000
8 - 8	14. A022122 8010101001	10-12-2021 10-12-2021 210301701001600	1 3,350,000	Aplikasi SAMAWA Software Komputer Pembelian	10-12-2021	2. DIL 1. Baik	53611	Aplikasi SAMAWA 1. Harga Perolehan. 3,350,000

REGISTER TRANSAKSI HARIAN
TRANSAKSI PEMBELIAN
PERIODE: 1 JANUARI 2021 S/D 31 DESEMBER 2021

Tgl Cetak : 16-01-2022

Halaman : 3

NAMA UAKPB : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DIY

KODE UAKPB : 115.01.0400.686332.000.KD

No. URUT	NO. SPPA KD. ASET NO. ASET	TGL.PERLH. TGL. BUKU NO_BUKTI	KETERANGAN JUMLAH NILAI PER SATUAN	NAMA ASET ASAL PEROLEH TOTAL RUPIAH	TGL.SP2D	TERCATAT KONDISI NO.SP2D	JNS. BLJ	MERK/TYPE ASET DASAR HARGA RPH.SPM
9 - 9	15. A022123	10-12-2021 10-12-2021 210301701001600	Aplikasi E-SPP 1 3,350,000	Software Komputer Pembelian 3,350,000	10-12-2021	2. DIL 1. Baik 210301701001600	53611	Aplikasi E-SPP 1. Harga Perolehan. 3,350,000
16 - 16	16. A022124 3060101088	20-12-2021 20-12-2021 210301701001879	Sony ICD-PX370 1 1,375,000	Voice Recorder Buah Pembelian 1,375,000	20-12-2021	1. DIR 1. Baik 210301701001879	53211	Sony ICD-PX370 1. Harga Perolehan. 1,375,000

SURAT KETERANGAN
Nomor: 161 /PL.08/YO/09/2021

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Screning Yosmar Dano, M.Si.
NIP : 19700513 198903 1 001
Jabatan : Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Barang

dengan hormat menerangkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil Inventarisasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2021 sesuai Berita Acara Hasil Inventarisasi Barang Milik Negara Pada Kuasa Pengguna Barang Nomor: 136/PL.07/YO/06/2021 tanggal 28 Juni 2021 terdapat barang-barang dengan status kondisi Rusak Berat;
2. Selanjutnya untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Nomor 0289/PL.07/SJ/08/2021 tanggal 31 Agustus 2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2021 serta untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, maka Barang Milik Negara tersebut perlu dilakukan penghentian penggunaannya.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 September 2021
Kepala Sekretariat,

Drs. Screning Yosmar Dano, M.Si.
NIP. 19700513 198903 1 001

Lampiran Surat Kuasa Pengguna Barang
 Nomor : 16 / PL.08/YO/09/2021
 Tanggal : 22 September 2021

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DALAM KONDISI RUSAK BERAT
 BAWASLU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Kode UAKPB : 115.01.04.686332.000.KD
 Nama UAKPB : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DIY

No	Identitas Barang					Kuantitas	Satuan Barang	Harga Perolehan
	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	NUP	Merk/Type			
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	3.05.01.05.010	Board	2014	8	White board tempel 90 x 190	1	Buah	797.000
2	3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	2017	5	Gemet Paper Shredder	1	Buah	1.125.000
3	3.05.01.05.017	Mesin Absensi	2015	1	Finger Print Time Tech F20	1	Buah	7.997.000
4	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2017	77	Meja kerja 1/2 Biro type COD 128 Modera	1	Buah	2.400.000
5	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2017	100	Meja Kerja 1 Biro Type COD 158 Modera	1	Buah	3.470.000
6	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2017	104	Meja kerja 1/2 Biro type COD 128 Modera	1	Buah	2.470.000
7	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2017	113	Meja kerja 1/2 Biro type COD 128 Modera	1	Buah	2.470.000
8	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2018	133	Modera/ Type Powel One POD 1475 + PHD 7338 140x75x84	1	Buah	1.600.600
9	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2013	53	Kursi Kerja Eselon IV	1	Buah	740.000
10	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2013	55	Kursi Kerja Eselon IV	1	Buah	740.000
11	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2013	61	Kursi Kerja Eselon III	1	Buah	3.980.000
12	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	184	Kursi Kerja 2 Type SC 309 Charman	1	Buah	795.250
13	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2017	256	Kursi Kerja 2 Type SC 309 Charman	1	Buah	770.000
14	3.05.02.04.001	Lemari Es	2014	4	Panasonic NRA172SH	1	Buah	1.650.000
15	3.05.02.04.001	Lemari Es	2014	5	Panasonic NRA172SH	1	Buah	1.650.000
16	3.05.02.04.004	A.C. Split	2014	3	Panasonic CU-PCSOKJ 1PK	1	Buah	5.555.000
17	3.05.02.04.004	A.C. Split	2016	12	Panasonic 1,5 PK	1	Buah	6.000.000
18	3.05.02.06.012	Wireless	2014	2	TOA ZWG810UC	1	Buah	8.002.500
19	3.06.01.02.128	Camera Digital	2013	3	Canon 1100 D	1	Buah	4.525.000
20	3.06.01.02.128	Camera Digital	2017	8	sony mirrorless digital camera	1	Buah	9.500.000
21	3.06.01.02.128	Camera Digital	2017	11	sony mirrorless digital camera	1	Buah	9.500.000
22	3.06.01.02.128	Camera Digital	2017	12	sony mirrorless digital camera	1	Buah	9.500.000
23	3.06.01.02.128	Camera Digital	2017	15	sony mirrorless digital camera	1	Buah	9.500.000
24	3.06.01.02.128	Camera Digital	2017	19	sony mirrorless digital camera	1	Buah	9.500.000
25	3.06.02.01.003	Pesawat Telephone	2016	3	Panasonic PABX 3 Co Line 16 Extention	1	Buah	18.000.000
26	3.06.02.01.010	Facsimile	2013	1	KX-FT981	1	Buah	1.590.000
27	3.10.01.02.001	P.C Unit	2014	20	PC. Workstation Lenove e32	1	Buah	22.700.000
28	3.10.01.02.001	P.C Unit	2017	43	Dell/Inspiron 3868 Desktop Core i3-7100	1	Buah	8.600.000
29	3.10.01.02.001	P.C Unit	2017	60	Dell/Inspiron 3868 Desktop Core i3-7100	1	Buah	8.600.000
30	3.10.01.02.002	Lap Top	2014	7	Lenovo Ideapad	1	Buah	7.618.500
31	3.10.01.02.002	Lap Top	2014	8	Lenovo Ideapad	1	Buah	7.618.500
32	3.10.01.02.002	Lap Top	2014	9	Lenovo Ideapad	1	Buah	7.618.500
33	3.10.01.02.002	Lap Top	2017	35	HP/ 240 G6 WIN 10 HOME	1	Buah	7.375.000
34	3.10.01.02.002	Lap Top	2017	41	HP/ 240 G6 WIN 10 HOME	1	Buah	7.375.000
35	3.10.01.02.002	Lap Top	2017	42	HP/ 240 G6 WIN 10 HOME	1	Buah	7.375.000
36	3.10.01.02.002	Lap Top	2017	43	HP/ 240 G6 WIN 10 HOME	1	Buah	7.375.000
37	3.10.01.02.002	Lap Top	2018	48	Lenovo Ideapad	1	Buah	6.500.000
38	3.10.01.02.002	Lap Top	2018	49	Lenovo Ideapad	1	Buah	6.500.000
39	3.10.01.02.002	Lap Top	2019	83	HP 14s-cf0069	1	Buah	8.000.000
40	3.10.01.02.002	Lap Top	2019	84	HP 14s-cf0069	1	Buah	8.000.000
41	3.10.01.02.002	Lap Top	2019	85	HP 14s-cf0069	1	Buah	8.000.000
42	3.10.01.02.002	Lap Top	2019	86	HP 14s-cf0069	1	Buah	8.000.000
43	3.10.01.02.002	Lap Top	2019	87	HP 14s-cf0069	1	Buah	8.000.000
44	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal K	2014	10	Printer EPSON L355 PSC	1	Buah	2.750.000
45	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal K	2017	28	HP Laser Jet Pro M12w	1	Buah	1.650.000
46	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal K	2017	57	HP Laser Jet Pro M12w	1	Buah	1.650.000
47	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal K	2017	58	HP Laser Jet Pro M12w	1	Buah	1.650.000
48	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal K	2017	59	HP Laser Jet Pro M12w	1	Buah	1.650.000
49	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal K	2017	77	Epson Pinter Inkjet L605	1	Buah	4.750.000
50	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal K	2017	83	Epson Pinter Inkjet L605	1	Buah	4.750.000
51	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal K	2017	85	Epson Pinter Inkjet L605	1	Buah	4.750.000
52	3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal	2015	3	Fujitsu Fi 7160	1	Buah	20.625.000
53	3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal	2015	4	Fujitsu Fi 7160	1	Buah	20.625.000
54	3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal	2017	9	Avison Scanner AD-240	1	Buah	17.500.000
Total								351.426.850



SURAT KETERANGAN

Nomor: 174 /PL.08/YO/10/2021

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Screning Yosmar Dano, M.Si.
NIP : 19700513 198903 1 001
Jabatan : Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Barang

dengan hormat menerangkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Laporan Inventarisasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2021 di lingkungan Bawaslu D.I.Yogyakarta dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I.Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 2021, masih terdapat beberapa Barang Milik Negara yang sudah usang, dikarenakan Barang Milik Negara tersebut tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan masa pakainya sudah habis;
2. Selanjutnya untuk menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Laporan Inventarisasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2021 serta berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, maka Barang Milik Negara tersebut perlu dilakukan penghentian penggunaannya.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Oktober 2021
Kepala Sekretariat,

Drs. Screning Yosmar Dano, M.Si.
NIP. 19700513 198903 1 001



Lampiran Surat Kuasa Pengguna Barang
 Nomor : ~~174~~ PL.08/YO/10/2021
 Tanggal: ~~29~~ Oktober 2021

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DALAM KONDISI RUSAK BERAT
 BAWASLU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Kode UAKPB : 115.01.04.686332.000.KD
 Nama UAKPB : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DIY

No	Identitas Barang					Kuantitas	Satuan Barang	Harga Perolehan
	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	NUP	Merk/Type			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3.05.01.01.008	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	2013	1	GX6750	1	Buah	1.944.000
2	3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	2017	4	Gemet Paper Shredder	1	Buah	1.125.000
3	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2019	194	UNO UEOD 3031 120x60x75	1	Buah	1.480.000
4	3.06.01.02.128	Camera Digital	2017	10	sony mirrolless digital camera	1	Buah	9.500.000
5	3.06.02.01.003	Pesawat Telephone	2017	5	Panasonic KX-FM-387	1	Buah	2.000.000
6	3.10.01.02.001	P.C Unit	2017	23	Dell/Inspiron 3668 Desktop Core i3-7100	1	Buah	8.600.000
7	3.10.01.02.001	P.C Unit	2017	35	Dell/Inspiron 3668 Desktop Core i3-7100	1	Buah	8.600.000
8	3.10.01.02.001	P.C Unit	2017	36	Dell/Inspiron 3668 Desktop Core i3-7100	1	Buah	8.600.000
9	3.10.01.02.002	Lap Top	2016	14	HPx360	1	Buah	9.850.000
10	3.10.01.02.002	Lap Top	2017	33	HP/ 240 G6 WIN 10 HOME	1	Buah	7.375.000
11	3.10.01.02.002	Lap Top	2019	58	HP 14" W10; i3 7020U; 2,3 Ghz;	1	Buah	7.990.000
12	3.10.01.02.003	Note Book	2015	1	Fujitsu TH 560 V2	1	Buah	10.000.000
13	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	13	Samsung SCX-3406FW	1	Buah	5.390.000
14	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	14	Samsung SCX-3406FW	1	Buah	5.390.000
15	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	66	CANON Pixma G3000	1	Buah	3.000.200
16	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	70	CANON Pixma G3000	1	Buah	3.000.200
17	3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2013	1	CanoscanLide 700F	1	Buah	1.924.000
18	3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2016	5	Fujitsu S1100i	1	Buah	3.250.000
TOTAL						18	-	99.018.400

LAMPIRAN VI

UAPB : BADAN PENGAWAS PEMILU
UAPPB-EI : SEKRETARIAT JENDERAL
UAPPB-W : BADAN PENGAWAS PEMILU DIY

LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 1 JANUARI 2021
TAHUN ANGGARAN :2021

UAKPB : BADAN PENGAWAS PEMILU DIY
KODE UAKPB : 115010400686332000KD

KODE	URAIAN	NILAI
117111	Barang Konsumsi	1,610,135
	Jumlah	1,610,135

Disetujui tanggal : 31 Desember 2021



Drs. Screening Yesther Dano, M.Si
NIP. 198903 1 001

Yogyakarta, 31 Desember 2021
Petugas Pengelola Persediaan,

Irene Marga Listyaningsih, S.Si
NIP. 19870501 202012 2 006

UAPB : BADAN PENGAWAS PEMILU
EAPPB-EI : SEKRETARIAT JENDERAL
UAPPB-W : BADAN PENGAWAS PEMILU DIY

LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TAHUN ANGGARAN :2021

UAKPB : BADAN PENGAWAS PEMILU DIY
KODE UAKPB : 115010400686332000KD

KODE	URAIAN	NILAI
117111	Barang Konsumsi	0
	Jumlah	0

Disetujui tanggal : 31 Desember 2021



Kepala Lembaga Barang,
Drs. Screning Yudianto Dano, M.Si
NIP. 198903 1 001

Yogyakarta, 31 Desember 2021
Petugas Pengelola Persediaan,

Irene Marga Listyaningsih, S.Si
NIP. 19870501 202012 2 006

**BERITA ACARA STOCK OPNAME FISIK PERSEDIAAN
BAWASLU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PER 31 DESEMBER 2021**
Nomor : 005-~~4~~PL.07/YO/01/2022

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Screning Yosmar Dano, M.Si.
NIP : 19700513 198903 1 001
Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama : Irene Marga Listyaningsih, S.Si
NIP : 19870501 202012 2 006
Jabatan : Operator Persediaan dan Simak BMN

Menyatakan bahwa telah melakukan Opname Fisik (Stock Opname) barang persediaan dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara per 31 Desember 2021 dengan hasil sebagai berikut.

UAKPB : BADAN PENGAWAS PEMILU DIY
KODE UAKPB : 115010400686332000KD

KODE	URAIAN	NILAI
		PER 31 DESEMBER 2021
117111	Barang Konsumsi	0
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0
117131	Bahan Baku	0
117199	Persediaan Lainnya	0
Jumlah		0

Keterangan:

1. Persediaan senilai Rp.0,- dalam kondisi rusak
2. Persediaan senilai Rp.0,- dalam kondisi usang

Demikian Berita Acara Stock Opname Fisik Persediaan ini dibuat sebagai dasar nilai barang persediaan pada Laporan Barang Milik Negara Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Sekretariat
Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta
Drs. Screning Yosmar Dano, M.Si.
NIP. 19700513 198903 1 001

Operator Persediaan dan Simak BMN,


Irene Marga Listyaningsih, S.Si
NIP. 19870501 202012 2 006

REGISTER TRANSAKSI HARIAN
PERSEDIAN MASUK (PEMBELIAN)
UNTUK PERIODE TAHUN 2021

KODE UAKPB : 115.01.0400.686332.000
UAKPB : BADAN PENGAWAS PEMILU DIY

NOMOR DOKUMEN	TGL. DOK.	TGL. BUKU	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN	TOTAL
115010400686332000KD202100002M	10-03-2021	10-03-2021	1010314001000004	- Handsanitizer	165	1,000	165,000
115010400686332000KD202100001M	25-03-2021	25-03-2021	1010314001000002	- Hand Sanitizer II	1,000	107	107,000
115010400686332000KD202100003M	21-10-2021	21-10-2021	1010301001000001	- pulpen	50	10,430	521,500
115010400686332000KD202100003M	21-10-2021	21-10-2021	1010301001000002	- Pensil	12	5,000	60,000
115010400686332000KD202100003M	21-10-2021	21-10-2021	1010301006000001	- Ordner	24	35,000	840,000
115010400686332000KD202100003M	21-10-2021	21-10-2021	1010301006000002	- Stopmap	211	2,000	422,000
115010400686332000KD202100003M	21-10-2021	21-10-2021	1010301012000001	- Staples	10	42,200	422,000
115010400686332000KD202100003M	21-10-2021	21-10-2021	1010301013000001	- Isi Staples	60	3,500	210,000
115010400686332000KD202100003M	21-10-2021	21-10-2021	1010301999000001	- tipex	10	23,350	233,500
115010400686332000KD202100003M	21-10-2021	21-10-2021	1010301999000002	- Binder Clip	113	10,000	1,130,000
115010400686332000KD202100003M	21-10-2021	21-10-2021	1010301999000003	- Post It Sign Here	5	21,000	105,000
115010400686332000KD202100003M	21-10-2021	21-10-2021	1010301999000004	- lem	5	15,000	75,000
115010400686332000KD202100003M	21-10-2021	21-10-2021	1010301999000005	- Stamp Pad	3	12,500	37,500
115010400686332000KD202100003M	21-10-2021	21-10-2021	1010301999000006	- Rautan	5	10,000	50,000
115010400686332000KD202100003M	21-10-2021	21-10-2021	1010301999000007	- Tempat Pensil	4	31,500	126,000
115010400686332000KD202100003M	21-10-2021	21-10-2021	1010301999000008	- Gunting	3	16,000	48,000
115010400686332000KD202100003M	21-10-2021	21-10-2021	1010301999000009	- Calculator	2	70,000	140,000
115010400686332000KD202100003M	21-10-2021	21-10-2021	1010301999000010	- Label	30	6,000	180,000

REGISTER TRANSAKSI HARIAN
PERSEDIAN MASUK (PEMBELIAN)
UNTUK PERIODE TAHUN 2021

KODE UAKPB : 115.01.0400.686332.000
UAKPB : BADAN PENGAWAS PEMILU DIY

NOMOR DOKUMEN	TGL. DOK.	TGL. BUKU	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN	TOTAL
115010400686332000KD202100003M	21-10-2021	21-10-2021	1010301999000011	- Lakban	24	18,000	432,000
115010400686332000KD202100003M	21-10-2021	21-10-2021	1010302001000001	- Kertas	25	69,200	1,730,000
115010400686332000KD202100003M	21-10-2021	21-10-2021	1010302004000001	- Amplop	16	21,875	350,000
115010400686332000KD202100003M	21-10-2021	21-10-2021	1010304004000001	- Tinta Printer	10	132,500	1,325,000
115010400686332000KD202100003M	21-10-2021	21-10-2021	1010304006000001	- Flashdisk	10	229,000	2,290,000
115010400686332000KD202100003M	21-10-2021	21-10-2021	1010304006000002	- USB	3	65,000	195,000
115010400686332000KD202100003M	21-10-2021	21-10-2021	1010304008000001	- CD	10	9,000	90,000
115010400686332000KD202100003M	21-10-2021	21-10-2021	1010304010000001	- Mouse	6	120,000	720,000
115010400686332000KD202100004M	09-11-2021	09-11-2021	1010314001000004	- Handsanitizer	4,500	125	562,500
115010400686332000KD202100005M	02-12-2021	02-12-2021	1010314001000004	- Handsanitizer	400	3,356	1,342,400
JUMLAH PERSEDIAN MASUK (PEMBELIAN)							13,909,400

REGISTER TRANSAKSI HARIAN
PERSEDIAN KELUAR (HABIS PAKAI)
UNTUK PERIODE TAHUN 2021

KODE UAKPB : 115.01.0400.686332.000

UAKPB : BADAN PENGAWAS PEMILU DIY

NO. DOKUMEN.	TGL. DOK.	TGL. BUKU	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
115010400686332000KD202100005K	29-11-2021	29-11-2021	1010314001000004	- Handsanitizer	4,500	Pemakaian
115010400686332000KD202100001K	18-01-2021	18-01-2021	1010314001000003	- Hand Sanitizer III	3,000	Pemakaian
115010400686332000KD202100002K	07-05-2021	07-05-2021	1010314001000002	- Hand Sanitizer II	1,000	pemakaian
115010400686332000KD202100006K	30-12-2021	30-12-2021	1010314001000004	- Handsanitizer	400	
115010400686332000KD202100004K	29-10-2021	29-10-2021	1010301006000002	- Stopmap	211	Pemakaian
115010400686332000KD202100003K	10-05-2021	10-05-2021	1010314001000004	- Handsanitizer	165	Pemakaian
115010400686332000KD202100004K	29-10-2021	29-10-2021	1010301999000002	- Binder Clip	113	Pemakaian
115010400686332000KD202100004K	29-10-2021	29-10-2021	1010301013000001	- Isi Staples	60	Pemakaian
115010400686332000KD202100004K	29-10-2021	29-10-2021	1010301001000001	- pulpen	50	Pemakaian
115010400686332000KD202100004K	29-10-2021	29-10-2021	1010301999000010	- Label	30	Pemakaian
115010400686332000KD202100004K	29-10-2021	29-10-2021	1010302001000001	- Kertas	25	Pemakaian
115010400686332000KD202100004K	29-10-2021	29-10-2021	1010301006000001	- Ordner	24	Pemakaian
115010400686332000KD202100004K	29-10-2021	29-10-2021	1010301999000011	- Lakban	24	Pemakaian
115010400686332000KD202100004K	29-10-2021	29-10-2021	1010302004000001	- Amplop	16	Pemakaian
115010400686332000KD202100004K	29-10-2021	29-10-2021	1010301001000002	- Pensil	12	Pemakaian
115010400686332000KD202100004K	29-10-2021	29-10-2021	1010301012000001	- Staples	10	Pemakaian
115010400686332000KD202100004K	29-10-2021	29-10-2021	1010301999000001	- tipex	10	Pemakaian
115010400686332000KD202100004K	29-10-2021	29-10-2021	1010304004000001	- Tinta Printer	10	Pemakaian
115010400686332000KD202100004K	29-10-2021	29-10-2021	1010304006000001	- Flashdisk	10	Pemakaian
115010400686332000KD202100004K	29-10-2021	29-10-2021	1010304008000001	- CD	10	Pemakaian
115010400686332000KD202100004K	29-10-2021	29-10-2021	1010304010000001	- Mouse	6	Pemakaian
115010400686332000KD202100001K	18-01-2021	18-01-2021	1010307004000003	- Sarung Tangan I	5	Pemakaian
115010400686332000KD202100004K	29-10-2021	29-10-2021	1010301999000003	- Post It Sign Here	5	Pemakaian
115010400686332000KD202100004K	29-10-2021	29-10-2021	1010301999000004	- lem	5	Pemakaian
115010400686332000KD202100004K	29-10-2021	29-10-2021	1010301999000006	- Rautan	5	Pemakaian
115010400686332000KD202100004K	29-10-2021	29-10-2021	1010301999000007	- Tempat Pensil	4	Pemakaian
115010400686332000KD202100001K	18-01-2021	18-01-2021	1010307002000003	- Masker I	3	Pemakaian

REGISTER TRANSAKSI HARIAN
PERSEDIAN KELUAR (HABIS PAKAI)
UNTUK PERIODE TAHUN 2021

KODE UAKPB : 115.01.0400.686332.000

UAKPB : BADAN PENGAWAS PEMILU DIY

NO. DOKUMEN.	TGL. DOK.	TGL. BUKU	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
115010400686332000KD202100001K	18-01-2021	18-01-2021	1010307002000007	- kaca mata medis	3	Pemakaian
115010400686332000KD202100001K	18-01-2021	18-01-2021	1010307005000002	- Boot I	3	Pemakaian
115010400686332000KD202100004K	29-10-2021	29-10-2021	1010301999000005	- Stamp Pad	3	Pemakaian
115010400686332000KD202100004K	29-10-2021	29-10-2021	1010301999000008	- Gunting	3	Pemakaian
115010400686332000KD202100004K	29-10-2021	29-10-2021	1010304006000002	- USB	3	Pemakaian
115010400686332000KD202100004K	29-10-2021	29-10-2021	1010301999000009	- Calculator	2	Pemakaian